

EKONOMI SUMBER DAYA LOKAL
(Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Binaan
UIN Raden Intan di Provinsi Lampung)

DISERTASI

Oleh : Hanif

NPM : 1870031009



PROGRAM STUDI STRATA TIGA
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2021

ABSTRAK

Program Desa Binaan telah dilaksanakan UIN Raden Intan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, namun program pemberdayaan ekonomi desa binaan tersebut belum pernah dievaluasi dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan kondisi tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi ini adalah bagaimana proses, implementasi dan hasil program serta program yang ideal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Studi evaluasi program Desa Binaan UIN Raden Intan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bahwa program kurang didukung dengan strategi yang memadai. Program secara umum dapat diterima oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi, meskipun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Penyebabnya adalah program tidak dijalankan dengan prinsip keberlanjutan, yang menuntut partisipasi aktif masyarakat desa pada seluruh tahapan program dan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia.

Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sesuai pedoman dilaksanakan dengan prinsip Kemitraan Universitas Masyarakat (KUM). Dalam skema KUM, kedudukan Universitas dan Masyarakat setara. Untuk meningkatkan signifikansi hasil, Universitas bekerjasama dengan mitra internal maupun eksternal kampus ditingkatkan perannya sebagai inkubator usaha-usaha rintisan masyarakat dan menjadikan nilai Tanggungjawab sosial Universitas/*University Social Responsibility* (USR) sebagai nilai utama program.

Kata kunci: *evaluasi CIPP, sumber daya lokal, kemitraan universitas-masyarakat, dan tanggungjawab sosial universitas*

ABSTRACT

Assisted Village Program has been carried out by UIN Raden Intan aiming to increase community independence. Assisted Village program has never been evaluated using an accountable method. Based on these conditions, this dissertation is trying to answer the following research problem: how is the process of community service in targeted villages; what are the implementation and results of the program as well as what is the ideal program form for the community economic empowerment program.

The evaluation model used the CIPP evaluation (Context, Input, Process, and Product). The research results showed that ‘Desa Binaan’ economic empowerment program was not supported by an adequate strategy. While the program in general can be accepted by the community with high enthusiasm, it has not had a significant impact on the economy of targeted village. This condition was mainly caused by the lack of sustainability principle and utilization of local resources.

Community Service in Islamic Religious Higher Education is carried out with the principle of University-community Partnership. Based on the partnership principle, relation between university and community are equal. University role can be increased through collaboration with internal and external partners of the campus as an incubator for community pilot projects. Furthermore, the University value which is known as University Social Responsibility (USR) should be applied as the main value of the program.

Keywords: CIPP evaluation, local resources, university-community partnership, and university social responsibility

ملخص

منهج التمكين الاقتصادي هي احدى من أشكال تنفيذ مهام خدمة المجتمع تم تنفيذه خدمة المجتمع خلال التدريب في مجال إنتاج الأغذية والأعمال اليدوية لتحديد فعالية وأهمية نتائج البرنامج على الحياة الاقتصادية لمجتمع القرية المستهدف

التمكين الاقتصادي هي طريقة البحث هذه الأطروحة. يهدف إلى المساعدة في تقييم جميع مراحل البرنامج ، و أن نموذج التقييم المستخدم هو التقييم السياق ، المدخلات ، العملية ، والإخراج . نموذج التقييم السياق ، المدخلات ، العملية ، والإخراج اختياره لأنه كان أكثر شمولاً وتم استخدامه لتقييم البرامج في القرية مع تحقيق الهدف في مجال خدمة المجتمع الخطة 2019-2017المساعدة في فترة البرنامج العام الاستراتيجية الجامعة الحكوميه الإسلامية رادين انتان الفوائد التي من المتوقع أن تظهر من خلال هذه الدراسة التقييمية هي أن النتائج يمكن استخدامها كأساس لتطوير الأساليب والتصاميم لبرامج خدمة المجتمع . تبين أن البرنامج لم يكن مدعوماً باستراتيجية مناسبة ، كما أن موضوع البرنامج لا يتماشى مع رؤية الجامعة. الحياة الاقتصادية القرية المستهدف ، والسبب الرئيسي هو أن البرنامج لا يتم تنفيذه بمبدأ الاستدامة .، فلا يزال تحقيق الأهداف التي تم تحديدها ضئيلاً للغاية

وفقاً لإرشادات خدمة المجتمع في الكلية الدينية الإسلامية. يحتاج مراكز خدمة المجتمع إلى إعداد خطة رئيسية لتنمية خدمة المجتمع كدليل استرشادي لاستراتيجية تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي من خلال زيادة دور مركز خدمة المجتمع

الكلمة الرئيسية: التقييم ج ج إ ف, الموارد المحلية, شراكات بين الجامعة والمجتمع ، والمسؤولية الاجتماعية للجامعة





MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

PERSEMBAHAN

Untuk istriku Siti Nur Aini, S.Ag
dan anak-anakku Denaya Amalia, Nayla Mumtaz dan Fachry Raditya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi dengan tema studi evaluasi program pemberdayaan ekonomi desa binaan UIN Raden Intan ini ditulis tidak hanya menjadi salahsatu syarat akademik guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu Pengembangan Masyarakat Islam akan tetapi yang jauh lebih penting adalah manfaat yang dapat penulis sumbangkan bagi pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Mitra. Evaluasi yang dilaksanakan dalam penelitian disertasi ini bukan bertujuan untuk menghakimi tapi lebih ditekankan pada perbaikan-perbaikan dan program desa mitra yang menjadi usulan dalam disertasi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam merancang program pemberdayaan ekonomi dan dapat menjadi salahsatu bentuk tanggungjawab sosial universitas terhadap masyarakat sekitar.

Penulisan disertasi ini dapat terselesaikan melalui kontribusi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan izin untuk studi lanjut pada program strata tiga Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung.

2. Prof. Dr. Idham Cholid, M.Ag selaku Direktur Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan bimbingan terutama terhadap substansi disertasi.
3. Bambang Budi Wiranto, Ph.D dan Dr. Fitriyanti selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Strata Tiga Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung dan seluruh Dosen serta jajaran Tenaga Kependidikan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada program S3 Pengembangan Masyarakat Islam dan telah membantu secara administratif seluruh proses perkuliahan.
4. Prof. Dr. H. Achlami, MA selaku Promotor I, yang telah dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan perbaikan demi sempurnanya disertasi ini.
5. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M selaku Promotor II, yang telah banyak memberikan masukan terutama mengenai kajian teoritik tentang kebaruan (*novelty*) dalam disertasi ini.
6. Dr. Ruslan A. Ghofur, M.SI selaku Promotor III yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, gagasan, dan memberikan bimbingan dalam penyusunan disertasi ini.
7. Dr. Alamsyah, M.Ag (Wakil Rektor I), Dr. Erina Pane, M.Hum (Ketua LPPM), H.Supaijo S.H., M.H (Kepala PPM), Dr. Isnaini dan Dr. Budimansyah (Tim Desa Binaan 2017-2019) dan seluruh jajaran LPPM yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian, membantu mengumpulkan dan mengolah data lapangan yang dibutuhkan dalam penulisan Disertasi ini.

8. Kepala desa dan Masyarakat desa Bandungbaru, Wai Sari dan Sumberjaya yang telah bersedia menjadi informan penelitian
9. Rekan-rekan mahasiswa program S3 Pengembangan Masyarakat Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2018 yang telah membantu berdiskusi terutama pada saat penyusunan proposal.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kritik, saran sangat diharapkan agar lebih bermanfaat

Bandar Lampung, Januari 2021

Penulis

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Hanif

NPM : 1870031009

Program Studi : Strata Tiga Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan:

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar doktor baik di UIN Raden Intan Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim promotor.
3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya peroleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, April 2021
Yang menyatakan,

Hanif
NPM. 1870031009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian.....	18
E. Manfaar Penelitian.....	18
F. Kerangka Pemikiran Teori.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	25
A. Deskripsi Konseptual Program.....	25
1. Pengembangan Masyarakat.....	25
2. Pengembangan Masyarakat Islam.....	50
3. Pengembangan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi.....	59
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Program Desa Binaan.....	64
5. Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....	75
6. Evaluasi Program.....	85
B. Deskripsi Program Desa Binaan.....	91
C. Model Evaluasi.....	96
D. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	103
E. Kriteria Evaluasi.....	117
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	119
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	119
B. Pendekatan, Metode dan Desain Model Penelitian.....	120
C. Instrumen Penelitian.....	123
D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	125
E. Informan Penelitian.....	131
F. Teknik Analisis Data.....	132

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	134
A. Hasil Evaluasi.....	134
1. Profil Desa Binaan	134
2. Evaluasi <i>Context</i>	147
3. Evaluasi <i>Input</i>	165
4. Evaluasi <i>Process</i>	170
5. Evaluasi <i>Product</i>	176
B. Pembahasan.....	190
1. Aspek <i>Context</i>	190
2. Aspek <i>Input</i>	204
3. Aspek <i>Process</i>	212
4. Aspek <i>Product</i>	218
C. Usulan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mitra.....	229
1. Deskripsi Program.....	229
2. Tujuan Program.....	231
3. Kerangka Pendanaan	232
4. Mekanisme Program	232
5. Strategi Program.....	233
6. Skema Program	235
D. Pemberdayaan Ekonomi Untuk Mewujudkan Kemandirian Umat.....	237
1. Kondisi Umum Ekonomi Umat Islam.....	237
2. Kebutuhan Pemberdayaan Ekonomi Umat	241
3. Ekonomi Sumber Daya Lokal dan Kemandirian Umat	245
4. Dakwah Pemberdayaan Ekonomi	248
a. Aspek <i>Context</i>	248
b. Aspek <i>Input</i>	250
c. Aspek <i>Process</i>	255
d. Aspek <i>Product</i>	259
 BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	 265
A. Kesimpulan	265
B. Rekomendasi	271

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>The Comparison of Self-help, Technical Assistance and Conflict</i>	44
Tabel 2.2. Perbandingan Paradigma Pembangunan Perdesaan.....	65
Tabel 2.3. Perbedaan Model Membangun Desa dan Desa Membangun	66
Tabel 2.4. Hubungan Evaluasi Sumatif, Formatif dan CIPP	99
Tabel 2.5. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu	117
Tabel 2.6. Kriteria Evaluasi	118
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian di Lapangan.....	120
Tabel 3.2. Instrumen Penelitian Aspek <i>Context</i>	124
Tabel 3.3. Instrumen Penelitian Aspek <i>Input</i>	124
Tabel 3.4. Instrumen Penelitian Aspek <i>Process</i>	125
Tabel 3.5. Instrumen Penelitian Aspek <i>Product</i>	125
Tabel 3.6. Panduan Observasi dan Dokumentasi.....	128
Tabel 3.7. Panduan Wawancara Dengan Informan Internal	129
Tabel 3.8. Panduan Wawancara Dengan Informan Eksternal.....	130
Tabel 4.1. Luas Lahan Pekon Bandungbaru Berdasarkan Peruntukan	136
Tabel 4.2. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Bandungbaru	137
Tabel 4.3. Jenjang Pendidikan Penduduk Pekon Bandungbaru	138
Tabel 4.4. Luas Lahan Desa Sumberjaya Berdasarkan Peruntukan.....	140
Tabel 4.5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumberjaya.....	141
Tabel 4.6. Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Sumberjaya	142
Tabel 4.7. Luas Lahan Desa Wai Sari Berdasarkan Peruntukan.....	145
Tabel 4.8. Mata Pencaharian Penduduk Desa Wai Sari.....	145
Tabel 4.9. Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Wai Sari	146
Tabel 4.10. Petani dan Luas Lahan Garapan.....	250
Tabel 4.11. Proses Dakwah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	257
Tabel 4.12. Prinsip Muamalah Dalam Dakwah Pemberdayaan Ekonomi	258

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Pemikiran Teori	24
Gambar 2.2. <i>Universities Areas of Social Responsibility</i>	74
Gambar 2.3. Hubungan Komponen Evaluasi CIPP	100
Gambar 4.1. Skema Usulan Program Desa Mitra	235

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	”
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Huruf dan Tanda
— /	— / A
— /	— / ا
— ء	— / U

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dalam aspek ekonomi membawa dampak yang sangat besar terhadap pergeseran pola konsumsi masyarakat, motif awal kegiatan konsumsi bermula dari upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi, motif ini bergeser, saat ini masyarakat cenderung mengkonsumsi barang mengikuti trend, dan mengkonsumsi barang secara berlebih-lebihan, konsumerisme dan kemewahan menjadi sebuah gaya hidup dan hal ini semakin diperparah dengan mudahnya masyarakat memperoleh kredit konsumtif, terutama kredit kendaraan bermotor yang sebenarnya jauh dari kemampuannya untuk mencicil kredit tersebut, sehingga pada banyak kasus, masyarakat akhirnya terjatuh dengan praktik-praktik rente yang sangat merugikan.

Konsumerisme adalah sebuah gaya hidup dimana orang memiliki keinginan yang tinggi untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang jauh melebihi kebutuhan sebenarnya. Fenomena yang sering terjadi adalah pemenuhan keinginan tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan terutama terkait dengan kemampuan atau potensi ekonomi yang dimiliki. Sementara itu Budaya Konsumerisme adalah sebuah ideologi yang dijadikan sebagai gaya hidup dimana ukuran kebahagiaan dan kesenangan ditentukan oleh konsumsi akan barang mewah.

Budaya konsumerisme adalah gaya hidup boros dimana orang didorong untuk secara terus menerus melakukan konsumsi, gaya hidup ini menghilangkan batas-batas antara kebutuhan hidup dan keinginan, bahkan orang dapat terjebak pada kegagalan dalam memprioritaskan antara barang yang harus dipenuhi dengan keinginan belaka.¹ Dalam pandangan masyarakat penghargaan dan penghormatan diukur dari kemewahan gaya hidup, semakin mahal dan mewah barang yang dimiliki maka semakin tinggi derajat sosial di tengah masyarakat. Pergeseran nilai tersebut membentuk perilaku hedonisme, yaitu sebuah pandangan hidup dimana tujuan utamanya adalah materi.

Perilaku Konsumtif dan gaya hidup hedonisme sangat dilarang dalam ajaran Islam. Perilaku konsumtif dalam Islam identik dengan istilah *israf*, Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf ayat 31 :

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya :

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan.

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk memakai pakaian yang *zinah* (bagus) ketika masuk ke dalam masjid, yang dimaksud pakaian bagus adalah pakaian yang menutupi *aurat*, bersih dan lebih baik lagi indah, berpakaian bagus dan

¹ Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, *Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna*, Jurnal Sosial Politik Humaniora, Vol. 7, No. 1, (2019);, h.1-21.

² Quran.kemenag.go.id/7

indah tidak diharamkan, tapi Allah SWT memberi batasan untuk jangan berlebihan, karena pakaian bagus dan indah belum tentu mewah dan mahal, artinya dalam mengkonsumsi kebutuhan pokok (sandang dan pangan) tidak melebihi kemampuan.

Seorang Muslim membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang konsumsi yang Islami untuk menyesuaikan perilaku konsumsi mereka. Pemahaman tersebut secara ideal akan berimbas pada perilaku konsumen muslim dalam kehidupan sehari-hari, Allah SWT berfirman dalam surat al-Ma'idah, ayat 87 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemah :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”³

Ayat di atas turun terkait dengan pemahaman yang keliru dari beberapa orang sahabat, mereka mengira bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT harus meninggalkan kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya, para sahabat tersebut beranggapan bahwa kenikmatan duniawi akan membuat terlena dan akhirnya lalai dalam menjalankan perintah Allah SWT. Allah telah menciptakan dan menyediakan segala sesuatu yang baik dan halal untuk kehidupan

³ ibid

manusia dan secara tegas telah menetapkan yang haram, dan mengkonsumsi sesuatu yang baik dan halal diperbolehkan sepanjang tidak melampaui batas. Peringatan Allah pada hambaNya di akhir ayat tersebut sangat jelas, bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Maka dengan memperhatikan peringatan tersebut setiap pekerjaan harus dalam batas-batas yang diajarkan agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas lainnya yang dipengaruhi oleh akal, pikiran dan perasaan, misalnya batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya.

Islam memberikan pedoman konsumsi bagi umatnya, yaitu: hanya mengkonsumsi produk halal, tidak melakukan konsumsi yang berlebihan (*israf*), membayar zakat, infaq, dan amal, dan membuat kebutuhan prioritas.⁴ Islam mengajarkan bahwa, perilaku konsumen Muslim dalam membeli barang harus berdasarkan nilai barang (*value of thing*), hal ini menuntut seorang Muslim untuk berhenti terlibat dalam pembelian barang atau jasa yang baik haram (melanggar hukum) atau dapat menimbulkan masalah bagi orang lain. Muslim diperintahkan untuk hidup secara sederhana, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 26 :

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemah :

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

⁴ Zulfikar Alkautsar dan Meri Indri Hapsari, *Implementasi, Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 1 No. 10 (Oktober 2014), h.736-754.

Kandungan ayat di atas terdiri dari dua dimensi, sosial dan ekonomi, secara sosial seorang Muslim dituntut untuk memiliki kepedulian terhadap sesama dan harus memiliki kesadaran bahwa dalam setiap hartanya ada hak untuk orang lain, secara ekonomi seorang Muslim harus melakukan perhitungan yang cermat dalam menggunakan hartanya dengan tidak berlaku boros dan sudah seharusnya hidup sederhana dengan tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan, sehingga mendorong keajahteraan di masa depan.⁵

Tantangan terbesar masyarakat Islam di tengah maraknya perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis saat ini adalah mewujudkan kemandirian ekonomi, yaitu sebuah masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi menjadi isu penting karena ketidakberdayaan masyarakat menghadapi dampak negatif globalisasi, masyarakat Islam khususnya tidak memiliki peran yang cukup besar dari sisi produksi, maka agar lebih berdaya masyarakat harus mampu mengubah dirinya sendiri untuk menjadi masyarakat yang lebih produktif. Potensi untuk menjadi masyarakat produktif bukanlah hal yang mustahil karena Indonesia memiliki sumberdaya yang cukup melimpah, oleh karena itu pemberdayaan ekonomi berbasis sumberdaya lokal atau *Local Economic Development (LED)* adalah konsep yang tepat untuk pengembangan masyarakat Islam menuju masyarakat yang produktif. LED adalah proses pembangunan yang bersifat partisipatif dengan mendorong kemitraan sinergis antara pihak berkepentingan baik swasta maupun publik terutama dalam wilayah yang terdefinisi, dengan

⁵ Tahir Ahmad Wani, *Buying Behaviour-An Islamic Perspective An Analysis Of An Ideal Muslim Buying Behaviour*, The Journal of Commerce, Vol. 5, No. 2, (February, 2014), h.10-15.

kemitraan tersebut strategi pembangunan dapat dirancang dan diimplementasikan secara bersama dengan secara maksimal memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang tersedia, dan keuntungan kompetitif dalam konteks global dengan tujuan akhir menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.⁶

Konsep pemberdayaan ekonomi lokal atau *Local Economic Development* (LED) sebenarnya bukanlah konsep baru, konsep ini sudah digunakan secara global dalam penganggulangan dampak krisis terhadap ekonomi masyarakat. Secara global konsep LED telah digunakan oleh organisasi-organisasi non profit dunia untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat Aceh pasca bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami tahun 2004. *International Labour Organization* (ILO), salahsatu organ Perserikatan Bangsa Bangsa, termasuk organisasi non profit yang terlibat langsung dalam pemulihan ekonomi masyarakat Aceh, ILO mendeskripsikan LED sebagai berikut :

*“LED means more than just economic growth. It is promoting participation and local dialogue, connecting people and their resources for better employment and a higher quality of life for both men and women.”*⁷

Dalam deskripsi tersebut, ILO menganggap bahwa LED tidak sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, yang menjadi fokus utama adalah adanya partisipasi masyarakat dan terciptanya dialog diantara pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat, dan membantu masyarakat mengenal

⁶ Martin Gasser, Carmela Salzano, Roberto Di Meglio, Alfredo Lazarte-Hoyle, *Pembangunan Ekonomi Lokal dalam Situasi Pasca Krisis : Panduan Operasional*, Kantor Perburuhan Internasional, (Jakarta 2005), h.29

⁷ https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm, diakses tanggal 2 Oktober 2020

sumberdaya yang mereka miliki untuk menciptakan pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik. LED menandai perubahan paradigma pembangunan ekonomi, dari sentralistis menjadi desentralistis, dengan paradigma desentralisasi maka keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat ditentukan oleh bagaimana pengambil kebijakan melihat realitas persoalan ekonomi masyarakat lokal.

Konsep LED juga menjadi strategi pembangunan ekonomi Indonesia, salahsatu program LED pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), PNPM Mandiri adalah program pemerintah secara nasional dalam bentuk kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.⁸ PNPM, seperti program LED lainnya menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui kreatifitas dan inovasi yang dimiliki untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya keahlian maupun sumberdaya alam sekitar (lokal).

Provinsi Lampung adalah provinsi dengan luas wilayah 34,6 ribu kilometer persegi atau sekitar 3,5 juta hektar memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup besar, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan hingga pariwisata, dari jumlah penduduk berdasarkan sensus terakhir tahun 2019 jumlah penduduk Lampung mencapai lebih dari 8,4 juta orang atau sekitar 14,46 persen dari

⁸ <https://www.pnpm-mandiri.org/PengertiandanTujuan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2020

keseluruhan jumlah penduduk Sumatera. Posisi ini menempatkan Provinsi Lampung di posisi ketiga setelah Sumatera Utara sebesar 14,6 juta orang (24,87 persen), dan Sumatera Selatan dengan populasi sebesar 8,5 juta orang (14,46 persen). Dari sisi komposisi penduduk, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) merupakan kelompok umur yang paling besar yaitu berjumlah 5.677,5 ribu orang atau sekitar 67,21 persen dari total penduduk Lampung. Sementara itu jumlah penduduk yang tidak produktif yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas berjumlah 2.770,2 orang atau sekitar 32,79 persen.⁹ Dengan melihat perbandingan persentase komposisi jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dari persentase jumlah penduduk yang tidak produktif, hal tersebut menunjukkan Provinsi Lampung memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah tantangan sekaligus kesempatan, besarnya jumlah penduduk usia produktif jika tidak diimbangi dengan perbaikan tingkat pendidikan maka produktifitas tidak dapat ditingkatkan, demikian sebaliknya, besarnya jumlah penduduk usia produktif jika memiliki tingkat pendidikan yang baik dan dielaborasi dengan potensi sumberdaya alam yang ada, maka keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan sehingga produktifitas dapat ditingkatkan.

Dari segi kesejahteraan ekonomi, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung sampai dengan bulan Maret 2019 berjumlah 1,06 juta jiwa atau 12,62% dari seluruh jumlah penduduk, dari persentase tersebut penduduk miskin terbanyak

⁹ BPS Provinsi Lampung, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019*, (Bandar Lampung, 2019), h.5

ada di daerah pedesaan, dengan persentase 8,92%.¹⁰ Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung belum merata, kesenjangan pendapatan penduduk antara kota dan desa masih timpang, dengan demikian sudah selayaknya jika kebijakan ekonomi pemerintah lebih memihak kepada masyarakat desa dan strategi pembangunan lebih difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Desa dalam konteks pembangunan desa memiliki posisi yang penting karena mayoritas penduduk berada di pedesaan, Provinsi Lampung memiliki 2.446 Desa dalam 13 Kabupaten, desa-desa tersebut berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang diukur tahun 2018, yakni sebuah indeks untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan desa dengan unit analisisnya desa (*village*), memiliki nilai rata-rata sebesar 64,05. Nilai ini berada di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa tertinggal di Provinsi Lampung sebanyak 73 desa (2,98 persen), jumlah desa berkembang sebanyak 2.219 desa (90,72 persen), dan jumlah desa mandiri sebanyak 154 desa (6,3 persen). Provinsi Lampung berdasarkan nilai rata-rata indeks pembangunan desa setiap dimensi, mempunyai nilai rata-rata indeks tertinggi 80,12 pada Dimensi Aksesibilitas/Transportasi, sedangkan untuk rata-rata indeks terendah dengan nilai 48,29 adalah pada Dimensi Kondisi Infrastruktur. Sementara itu untuk Dimensi Pelayanan Dasar nilai rata-rata indeksnya adalah 64,40, Dimensi Pelayanan Umum sebesar 61,57, dan Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 71,88.¹¹

¹⁰ Ibid, h.75

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Desa 2018*, (Jakarta: BPS, 2019), h.33

Perkembangan Desa di Provinsi Lampung jika dilihat dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang diukur tahun 2019, memiliki nilai rata-rata 0,6378, berdasarkan nilai rata-rata tersebut, desa-desa di provinsi Lampung masuk dalam kategori desa berkembang¹², yaitu kategori desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi akan tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan dalam menanggulangi kemiskinan, berbeda dengan IPD, IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya, pengukuran IDM berbasis potensi desa. IDM Lampung berada diatas rata-rata nasional, dan menempati peringkat 11. Kategori desa berdasarkan IDM terdiri dari 6 desa sangat tertinggal, 226 desa tertinggal, 1.812 desa berkembang, 370 desa maju dan 21 desa mandiri.

Provinsi Lampung jika dilihat dari posisi geografis sangat strategis, sebagai pintu gerbang pulau Sumatera dan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang pesat, seperti tol Trans Sumatera, lalu lintas barang dan orang menjadi sangat lancar, sehingga potensi Lampung menjadi destinasi utama wisata alam dan kuliner sangat terbuka, untuk mewujudkannya diperlukan partisipasi aktif sektor publik, swasta dan masyarakat untuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif yang tumbuh dari kreatifitas, inovasi, keahlian yang dimiliki masyarakat dan hal tersebut sejalan dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis sumber daya lokal.

¹² Kemendes DT, *Status IDM Provinsi Kabupaten Kecamatan 2019*, (Jakarta: Kemendes DT, 2019), h.15

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan pada perguruan tinggi dapat dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang unggul, yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*), pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.¹³

UIN Raden Intan Lampung disamping memiliki kewajiban penyelenggaraan pendidikan juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh sivitas akademika untuk menguji teori atau ilmu pengetahuan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dengan menggunakan kaidah dan metode ilmiah, sedangkan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk membantu memajukan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa.

Dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan bangsa, UIN Raden Intan Lampung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)

¹³ Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5

telah melaksanakan berbagai program pengabdian pada masyarakat, pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh Mahasiswa melalui program KKN dan Dosen baik yang bersifat individu sesuai dengan bidang keahlian, maupun yang bersifat institusional melalui program Desa Binaan. Mahasiswa melaksanakan KKN sebagai salahsatu syarat kurikulum untuk memperoleh gelar sarjana, KKN dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi pengabdian, sementara tema pengabdian ditentukan sendiri oleh mahasiswa melalui survey awal sebelum penempatan di lapangan, karena tema KKN ditentukan sendiri oleh mahasiswa maka tidak jarang dalam satu kecamatan terdapat banyak tema KKN sama dengan banyaknya jumlah kelompok KKN yang diterjunkan pada kecamatan tersebut, hal ini tentu akan menyulitkan dalam mengukur tingkat keberhasilan program KKN.

Pengabdian pada Masyarakat (P2M) jika bagi Mahasiswa adalah beban kurikulum, maka bagi dosen adalah beban kinerja. Pengabdian pada Masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen prosesnya dimulai dari pengajuan proposal pengabdian untuk kemudian dilakukan seleksi, penentuan tema pengabdian ditentukan sendiri oleh Dosen tanpa syarat harus sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan, oleh sebab itu tidak jarang ditemui tema pengabdian dosen yang tidak sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya, padahal penentuan tema pengabdian menjadi hal yang penting untuk pengujian teori dan untuk memastikan program pengabdian berjalan secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengabdian pada Masyarakat dengan tema Pemberdayaan Ekonomi telah banyak dilaksanakan, secara institusional UIN Raden Intan memiliki program pemberdayaan ekonomi Desa Binaan yang mengusung tema besar peningkatan ekonomi keluarga melalui pembinaan usaha ekonomi kreatif, dengan cara mengadakan kegiatan pelatihan produksi kerajinan dan produksi makanan tradisional berbahan baku lokal, kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keahlian masyarakat pada usaha yang ditekuni, sehingga produktifitas dapat meningkat. Penentuan Desa sasaran dalam program Desa Binaan yang dilaksanakan oleh PPM didasarkan pada survey pendahuluan yang dilakukan oleh Tim Desa Binaan dan hasil program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, desa sasaran yang menjadi bahan kajian penelitian disertasi ini meliputi desa-desa di dua kabupaten, yaitu pekon Bandungbaru di Kabupaten Pringsewu dan desa Wai Sari serta desa Sumberrejo di Kabupaten Lampung Selatan. Karakteristik tiga desa tersebut sangat mirip terutama dalam hal mata pencaharian utama sebagai petani pada lahan pertanian tadah hujan dengan tingkat pendidikan penduduk mayoritas tingkat dasar dan menengah.

Sementara jika dilihat letak geografis, pekon Bandungbaru secara administratif relatif jauh lebih dekat jaraknya dengan ibukota kabupaten sebagai pusat pertumbuhan, dan terletak di pinggir jalan lintas kabupaten dengan kondisi infrastruktur jalan yang baik serta memiliki fasilitas pasar sebagai tempat transaksi ekonomi penduduk. Desa Wai Sari dan Sumberrejo jika dilihat jaraknya dengan ibukota kabupaten lampung selatan lebih jauh akan tetapi dua desa ini memiliki keuntungan lain karena jarak dengan ibukota provinsi lebih dekat, dalam hal

infrastruktur desa Wai Sari maupun desa Sumberrejo tidak memiliki pasar, akses pasar terdekat di kecamatan. Perbedaan dan persamaan karakteristik desa sasaran pembinaan UIN Raden Intan harus dijadikan dasar dalam menentukan model dan tema program, sehingga program akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan.

Program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan pada ketiga desa sasaran pembinaan tentu tidak cukup dengan hanya mengadakan kegiatan pelatihan saja, aspek yang tidak kalah penting adalah aspek keberlanjutan (*sustainability*), untuk menjamin sebuah usaha dapat terus hidup, keahlian manajemen dari proses produksi sampai dengan pemasaran sangat dibutuhkan, disamping pendorongan inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk melakukan diversifikasi usaha menyesuaikan dengan potensi pasar. Pada akhirnya program Desa Binaan secara ideal dapat menjadi bentuk tanggungjawab sosial universitas (*university social responsibility*) UIN Raden Intan Lampung terhadap masyarakat sekitar, sehingga nilai organisasi dapat meningkat dan dapat menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) di tengah persaingan global.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai lembaga publik UIN Raden Intan Lampung memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam memberikan solusi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat Islam akibat dari dampak negatif arus globalisasi di Provinsi Lampung, oleh karena itu Peneliti memandang perlu melaksanakan studi evaluatif secara komprehensif guna melihat efektifitas program pemberdayaan ekonomi UIN Raden Intan yang sudah berjalan, sehingga

dari studi ini akan muncul konsep model pengabdian baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumberdaya lokal yang tersedia, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, sehingga cita-cita masyarakat Islam menjadi masyarakat yang lebih produktif dan mandiri dapat terwujud.

B. Fokus Penelitian

Program Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Intan Lampung memiliki beberapa model dan tema, baik yang dilaksanakan oleh Dosen (individu dan institusi) maupun Mahasiswa (KKN). Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara institusi adalah program Desa Binaan, Desa Binaan ini memiliki dua bidang sasaran, yaitu: bidang sosial keagamaan dan bidang ekonomi. Penelitian disertasi ini mengevaluasi program Desa Binaan dalam bidang ekonomi yang difokuskan pada tiga tahap program pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu : (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi program, dan (3) evaluasi hasil atau dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Analisis terhadap tahap kebijakan bertujuan untuk melihat program dari sisi konteks dan input, yang meliputi proses perencanaan program, mulai dari penentuan tema, proses seleksi, sampai dengan penganggaran, penyusunan pedoman-pedoman dan peraturan pendukung lainnya. Keterlibatan *stakeholder* baik *stakeholder* internal maupun eksternal dan kesesuaian antara program pengabdian dengan visi dan misi universitas menjadi tolak ukur dalam perumusan kebijakan dan komitmen penganggaran untuk menjamin keberlanjutan program.

Tahap Implementasi program adalah tahap yang krusial, kebijakan-kebijakan program pemberdayaan ekonomi yang sudah dirumuskan harus dapat diimplementasikan di lapangan, pada tahap ini identifikasi terhadap kendala-kendala yang terjadi di lapangan dilakukan guna mengukur ketepatan pengambilan kebijakan dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan, pada proses implementasi ini kegiatan yang penting untuk dilakukan adalah kegiatan pemantauan/monitoring untuk mendeteksi secara dini kendala-kendala/masalah-masalah yang dihadapi di lapangan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program.

Tahap terakhir dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah evaluasi dampak atau hasil implementasi program terhadap ekonomi masyarakat, pada tahap evaluasi ini ditentukan kriteria-kriteria untuk mengukur efektifitas, efisiensi dan signifikansi hasil. Umpan balik dari masyarakat sasaran sangat diharapkan sebagai dasar dalam merumuskan model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang lebih efektif dan tepat sasaran.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perumusan kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung?
2. Bagaimana implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung?
3. Bagaimana efektifitas hasil program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung?

4. Bagaimana model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berdasarkan konsep pemberdayaan ekonomi lokal?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, memiliki beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menjelaskan proses perumusan kebijakan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menjelaskan pelaksanaan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung.
3. Untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menjelaskan dampak program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Binaan UIN Raden Intan Lampung.
4. Untuk mengevaluasi, menganalisis, menjelaskan dan mengusulkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa binaan yang ideal sesuai dengan kebutuhan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini, dengan merujuk pada masalah dan tujuan yang telah dirumuskan, dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dapat diberikan melalui studi evaluasi program pemberdayaan ekonomi desa binaan ini adalah dapat digunakan sebagai :

1. Dasar pengembangan konsep *Local Economic Development* dalam pemberdayaan ekonomi pada berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat, baik pada kondisi pasca krisis maupun kondisi normal.
2. Dasar penelitian lanjutan pada aspek-aspek yang belum diteliti, maupun pada lokasi penelitian yang berbeda dengan kondisi dan masalah ekonomi masyarakat yang berbeda.

Manfaat praktis penelitian ini lebih bersifat aplikatif sesuai dengan metode penelitian yang digunakan dan berorientasi pada hasil penelitian, manfaat praktis yang dapat diberikan adalah :

1. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan program pengabdian pada masyarakat secara umum dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara khusus.
2. Hasil penelitian menawarkan model pemberdayaan yang lebih efektif dan dapat diaplikasikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran Teori

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)¹⁴. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang atau sekelompok orang, khususnya yang terkategori sebagai kelompok rentan dan lemah sehingga dengan pemberdayaan tersebut, mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, dapat menjangkau sumber-sumber daya produktif yang memungkinkan mereka dapat

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h.57

meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan dan turut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pendekatan pokok dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah pendekatan *self-help*. Pendekatan *self-help* menggunakan secara murni kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, baik berupa dana maupun keahlian dalam melakukan perubahan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dimana masyarakat bertanggungjawab penuh terhadap apa yang dibutuhkan dan bagaimana tujuan dapat dicapai. Menurut Green (2011), pendekatan *self-help* tidak terlalu mementingkan pencapaian hasil dan dampak langsung, tetapi lebih tertarik untuk mempersatukan masyarakat dalam mengidentifikasi tujuan bersama. Melalui proses ini, masyarakat memperkuat kapasitasnya dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya yang dihadapi saat ini, tetapi juga yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan.¹⁵

Model yang paling sering digunakan melalui pendekatan *self-help* adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), model ABCD adalah model pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable*) yang menekankan pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, berbeda dengan model tradisional (*need based community development*) yang menekankan pada masalah dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan masyarakat berbasis aset dimulai dengan pengidentifikasian sumber daya yang dimiliki masyarakat, aset dalam konteks

¹⁵ Green Paul, Gary., *The Self-help Approach to Community Development : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*, ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green (California: Sage, 2011), h. 88

ABCD menurut Haines (2014) ada tiga, yaitu¹⁶ : modal bersifat fisik, modal sumberdaya manusia dan modal sosial. Modal yang bersifat fisik terdiri dari jalan raya, gedung, infrastruktur, dan sumberdaya alam dalam suatu masyarakat, modal fisik juga menjadi atribut yang menjadi ciri utama suatu masyarakat seperti jalan, rel, air dan saluran pembuangan, lingkungan perumahan, taman, kawasan industri, sekolah, gedung pemerintah, universitas atau perguruan tinggi, dan sebagainya. Modal manusia diartikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan, penting untuk disadari bahwa tidak hanya orang dewasa yang menjadi bagian dari persamaan modal manusia, tetapi anak-anak dan remaja juga berkontribusi. Modal sosial mengacu pada hubungan sosial dalam suatu komunitas dan dapat merujuk pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dibangun. Pengembangan masyarakat (*community development*) berbasis aset adalah pendekatan yang sangat menjanjikan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik tidak hanya secara ekonomi, tetapi melalui pengembangan semua bentuk modal yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang.¹⁷

Pemberdayaan ekonomi memiliki sasaran utama masyarakat desa, desa dalam pembangunan ekonomi Indonesia menempati posisi yang sangat penting karena mayoritas penduduk tinggal di daerah pedesaan, dengan demikian memberdayakan ekonomi masyarakat desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Posisi strategis desa menjadikan tanggungjawab pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata,

¹⁶ Anna Haines, *Asset-Based Community Development : An Introduction to Community Development*, ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. (New York: Routledge, 2009). h. 42

¹⁷ Ibid., h. 47

pemberdayaan ekonomi erat kaitanya dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu Perguruan Tinggi juga memiliki tanggungjawab yang sama. Perguruan tinggi dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan tersebut terjalin dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang ini tema-tema penelitian berbasis *action research* dan pengabdian kepada masyarakat berbasis *service learning* telah banyak memberikan manfaat, baik yang bersifat praktis maupun teoritis, terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai perguruan tinggi keislaman (*islamic higher education*) harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma Kemitraan Universitas-Masyarakat (KUM) sesuai dengan pedoman pengabdian kepada masyarakat (Dirjen Diktis, 2015), melalui paradigma kemitraan (*partnership*) masing-masing pihak memiliki tanggungjawab dan kontribusi yang sama dalam upaya pembangunan bangsa, kemitraan juga mengandung prinsip kesetaraan, perguruan tinggi menyumbangkan aset dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara masyarakat menyumbangkan aset dalam bentuk sumber daya alam dan modal sosial. Kedua komponen aset tersebut dapat diberdayakan secara bersama, sehingga model pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset (*asset based community development*) dan pengembangan yang didorong oleh masyarakat, harus diperkuat pada program pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

Paradigma kemitraan (*partnership*) dalam pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi muncul karena adanya kesadaran bahwa eksistensi perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat (*community engagement*), oleh karena itu perguruan tinggi tidak hanya berkewajiban memproduksi sarjana semata tetapi harus memiliki kepedulian sosial (*social responsibility*) yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat (*community service*). Konsep tanggungjawab sosial universitas (*University Social Responsibility*) merupakan respon perguruan tinggi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, lebih fokus pada pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada.

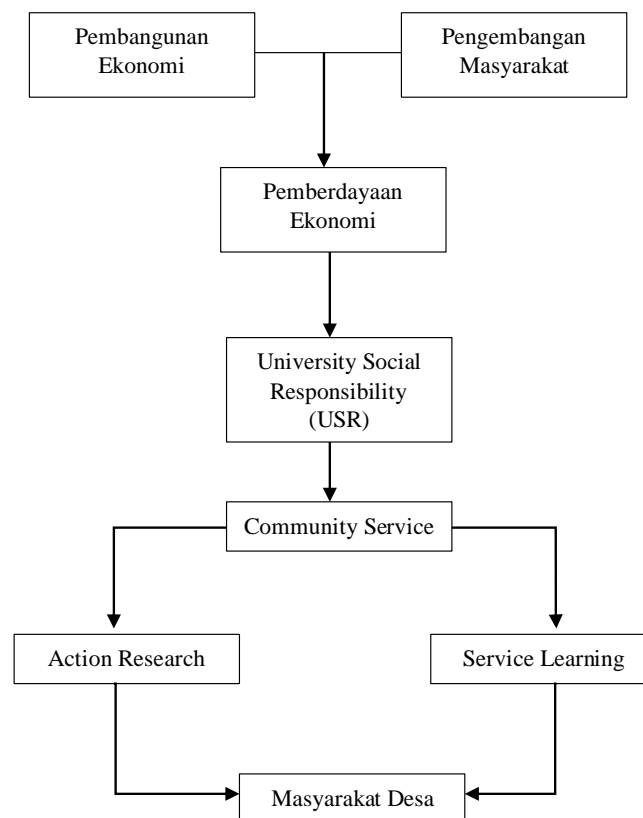
Reiser (2008) dalam Carlos Wing-Hung Lo (tt) mendefinisikan USR sebagai kebijakan kualitas etis dari kinerja civitas akademika universitas (mahasiswa, fakultas, dan tenaga administrasi karyawan) melalui manajemen yang bertanggung jawab atas pendidikan, tenaga kerja dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh Universitas, dalam dialog interaktif sekaligus partisipatif dengan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan.¹⁸ Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh universitas, Vallaey (2014) dalam Bokhari (2017) membedakan empat jenis: dampak organisasi yang mempengaruhi lingkungan universitas dan komunitas termasuk mahasiswa, staf dan akademisi; dampak pendidikan yang berkaitan dengan mendidik orang dan membentuk etika dan nilai; dampak kognitif yang berkaitan dengan membangun dan menghasilkan

¹⁸ Lo Wing-Hung, Carlos., et.all, *University Social Responsibility : Conceptualization and An Assessment Framework*, (New York: Springer, tt), h.40

pengetahuan, mengkonsolidasikan hubungan antara konteks teknologi dan sosial ilmu pengetahuan dan masyarakat; dan dampak sosial yang berkaitan dengan mempengaruhi masyarakat melalui pembinaan kemajuan, membangun modal sosial, dan mempersiapkan siswa untuk dunia nyata.

Gambar 1.1

Skema Pemikiran Teori



Pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat, pembangunan ekonomi dipandang sebagai upaya memobilisasi aset sementara pengembangan masyarakat adalah upaya untuk menghasilkan aset dalam bentuk keahlian dan keterampilan. Pemberdayaan

ekonomi merupakan elaborasi dari pembangunan ekonomi dan pengembangan masyarakat sebagai upaya menghasilkan sekaligus memobilisasi aset untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri.

Perguruan tinggi sesuai dengan amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan bangsa, dengan demikian pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi tanggungjawab perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan kehidupan masyarakat melalui skema tanggungjawab sosial universitas (*university social responsibility*). Tanggungjawab sosial universitas diimplementasikan melalui pelayanan masyarakat (*service community*) dengan dua pendekatan, yaitu *action research* dan *service learning*. *Action research* adalah metode penelitian dimana peneliti memiliki kewajiban melakukan penelitian dan sekaligus pengabdian, sementara *service learning* adalah metode pembelajaran berbasis pengabdian dimana Dosen dan mahasiswa mengalokasikan sebagian waktu perkuliahan untuk terjun di tengah masyarakat.

Masyarakat desa adalah sasaran utama pemberdayaan ekonomi, alasan pertama, masyarakat desa secara umum tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari masyarakat kota, dan alasan kedua mayoritas penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan sehingga dengan memberdayakan ekonomi masyarakat desa akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara nasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Konseptual Program

1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah sebuah usaha mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara aktif dan partisipatif dengan berlandaskan pada keadilan sosial dan prinsip saling menghargai. Pengembangan masyarakat dapat diartikan juga sebagai sebuah komitmen dalam memberdayakan masyarakat golongan lemah baik secara sosial maupun ekonomi sehingga mereka memiliki berbagai macam pilihan yang nyata menyangkut masa depan mereka sendiri.¹⁹ Sedangkan menurut Twelvetrees pengembangan masyarakat adalah sebuah proses membantu orang biasa untuk meningkatkan komunitasnya melalui tindakan bersama.²⁰

Prinsip pengembangan masyarakat pada definisi Twelvetrees tersebut adalah tindakan bersama (*collective actions*), tindakan bersama pada masyarakat akan terwujud jika setiap individu memiliki kesadaran untuk lebih mengutamakan kepentingan komunitas daripada kepentingan individu, dan memiliki motivasi yang sama untuk meningkatkan kapasitas komunitasnya. Tindakan bersama sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan masalah dan lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Tindakan

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 4.

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014) h. 38.

bersama juga mengubah pendekatan masyarakat terhadap masalah, meningkatkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dengan lebih banyak kreativitas dan perspektif yang lebih luas, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Pengembangan Masyarakat (*community development*) telah menjadi isu penting dewasa ini dalam menghadapi era globalisasi, pengembangan masyarakat telah menjadi paradigma pembangunan yang bersifat desentralistis, khususnya yang paling menonjol dalam bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi kreatif, dan penanggulangan masalah-masalah sosial. Untuk memahami pengembangan masyarakat perlu memahami dua hal penting yaitu : pengembangan (*development*) dan masyarakat (*community*). Masyarakat dapat merujuk pada tempat atau sekumpulan individu yang mempunyai kepentingan dan keterikatan yang sama tanpa terikat dengan jarak.²¹ Masyarakat dalam konteks tempat atau geografis adalah sekumpulan individu dalam sebuah lokasi yang memiliki sistem pemerintahan, sistem sosial, tradisi, konvensi dan hukum tertentu yang dianut secara kolektif. Masyarakat juga dipandang sebagai sekumpulan individu yang memiliki kepentingan yang sama, (misalnya kepentingan ekonomi atau politik), dan keterikatan yang sama, (misalnya dalam adat istiadat, hobby).

Pengembangan secara luas dapat berarti : modernisasi, industrialisasi, urbanisasi, peningkatan teknologi, transformasi sosial dan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Secara implisit yang dimaksud pengembangan adalah

²¹ Rhonda Phillips and Robert H. Pittman, *A Framework For Community and Economic Development : An Introduction to Community Development*, (New York : Routledge, 2009), h.5

perubahan yang diarahkan pada tujuan sosial atau ekonomi tertentu.²² Paradigma pengembangan pada definisi ini menitikberatkan pada perubahan/transformasi dari satu kondisi kepada kondisi lainnya yang lebih baik, perubahan/transformasi sendiri adalah sebuah proses yang sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan makna pengembangan dan masyarakat di atas, maka yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan proses perubahan yang diarahkan pada tujuan sosial atau ekonomi tertentu dengan masyarakat, baik dipandang secara geografis maupun kesamaan kepentingan, menjadi subyek sekaligus obyek pengembangan. Dalam pengembangan masyarakat terdapat dua tujuan, yaitu tujuan sosial dan tujuan ekonomi, hal ini berarti pembangunan ekonomi adalah bagian dari pengembangan masyarakat. Terkait dengan peran masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pengembangan memiliki makna masyarakat dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan masyarakat seringkali dijalankan melalui: (a) proyek-proyek pembangunan yang melibatkan anggota masyarakat sehingga mereka memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya, (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab.²³

²² Lorraine E. Garkovich, *A Historical View of Community Development : Introduction to community development*, (USA : Sage Publication Inc, 2011), h.20

²³ Payne, M., *Social Work and Community Care*, (London: McMillan, 1995), h.65

Pengembangan masyarakat telah berevolusi dan dikenal sebagai disiplin ilmu yang terdiri dari sosiologi, ekonomi, politik, perencanaan, geografi dan banyak lainnya, sehingga jika berbicara pengembangan maka tidak terlepas dari berbagai macam disiplin ilmu, pengembangan masyarakat melibatkan berbagai bidang ilmu karena mencakup masyarakat sebagai obyek pengembangan dari berbagai sisi.²⁴ Menurut Hustedde, terdapat tujuh teori yang menjadi dasar teori pengembangan masyarakat, yaitu:²⁵

1. Teori Modal Sosial

Kualitas hubungan sosial sangat penting untuk membangun solidaritas dan keberhasilan inisiatif masyarakat. Persahabatan, kepercayaan, dan kemauan untuk berbagi beberapa sumber daya merupakan bagian integral dari tindakan kolektif. Modal sosial adalah kumpulan sumber daya yang intrinsik dalam hubungan sosial dan mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan. Hal ini sering berkorelasi dengan kepercayaan pada lembaga publik, keterlibatan sipil, pembangunan ekonomi mandiri, dan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan. Uphoff dalam Yustika mendefinisikan modal sosial sebagai akumulasi dari beragam tipe dari aspek sosial, psikologi, budaya kelembagaan dan aset tak terlihat (*intangible*) yang mempengaruhi perilaku

²⁴ Phillips, Rhonda and Pittman H., Robert , *A Framework for Community and Economic Development : An Introduction to Community Development*, ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. (New York: Routledge, 2009). h. 5

²⁵ Hustedde J., Ronald, *Seven Theories For Seven Community Developers : An Introduction to Community Development*, ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. (New York: Routledge, 2009). h. 21

kerjasama. Modal sosial dapat dirasakan apabila terjadi interaksi dengan orang lain yang dipandu oleh struktur sosial.²⁶

Modal sosial memiliki persamaan dan perbedaan sifat dengan modal lainnya, yakni sama-sama memiliki sifat produktif yang memungkinkan tujuan dapat tercapai, dan tujuan tersebut tidak dicapai tanpa ada keberadaannya.²⁷ Sementara perbedaan modal sosial dengan modal yang lain, antara lain: (1) tidak habis karena digunakan, sebaliknya akan habis jika tidak digunakan. (2) tidak mudah diamati dan diukur dan (3) sulit dibangun dengan intervensi dari luar.²⁸

Faktor kunci dalam modal sosial adalah kepercayaan, kesetaraan dan timbal-balik. Kepercayaan adalah bagian dari hubungan sehari-hari, kepercayaan misalnya terhadap jumlah timbangan barang yang dijual oleh pedagang tidak akan berkurang, jika kepercayaan dapat dipelihara dalam setiap sendi kehidupan masyarakat maka hidup akan menjadi lebih mudah. Kesetaraan dianggap sebagai norma budaya penting yang tinggi dalam modal sosial karena mencapai lintas politik, ekonomi, dan budaya. Prinsip kesetaraan sarat dengan nilai-nilai solidaritas, berbeda dengan keadilan dimana seseorang memperoleh sesuatu sesuai dengan porsinya, kesetaraan lebih menonjolkan pada persamaan yang sifatnya absolut untuk meminimalisir perbedaan antara miskin dan kaya, perbedaan gender, ras,

²⁶ Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013) h. 140

²⁷ Coleman S, James, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, terj. Imam Mutaqien dkk, (Bandung : Nusa Media, 2011), h. 420

²⁸ Rustiadi, Ernan dkk, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 451.

suku dan agama. Timbal balik adalah norma budaya lain yang dipandang sebagai bagian dari modal sosial, timbal balik merupakan sifat saling memberi dan menerima manfaat, ini akan terjadi jika masyarakat memegang prinsip kepercayaan dan kesetaraan, jadi timbal balik merupakan wujud adanya kepercayaan dan kesetaraan dalam masyarakat.

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Konsep teoritis yang berkaitan dengan struktur dikenal sebagai fungsionalisme struktural. Ini juga disebut teori sistem, teori ekuilibrium, atau hanya fungsionalisme. Menurut kerangka teoritis ini, masyarakat mengandung struktur tertentu yang saling bergantung, yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu untuk pemeliharaan masyarakat. Struktur mengacu pada organisasi dan institusi seperti perawatan kesehatan, entitas pendidikan, bisnis dan nirlaba, atau kelompok informal. Fungsi merujuk pada tujuan, misi, dan apa yang mereka lakukan dalam masyarakat. Struktur ini menjadi dasar dari sistem sosial. Talcott Parsons dan Robert K. Merton adalah pelopor yang paling sering dikaitkan dengan teori ini.

Teori Fungsionalisme Struktural memiliki asumsi dasar, yaitu menganggap masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dan satu unsur tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dan keterkaitan dengan unsur lainnya. Dengan demikian jika ada perubahan pada satu unsur akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada akhirnya akan menciptakan perubahan pada unsur yang lain. Perkembangan teori fungsionalisme

struktural didasarkan pada model perkembangan sistem organisme biologi, asumsi dasar pada teori ini adalah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.²⁹

Menurut kerangka teoritis ini, masyarakat mengandung struktur tertentu yang saling bergantung, yang masing-masing menjalankan fungsi tertentu untuk pemeliharaan masyarakat. Integrasi masyarakat didasari oleh kesepakatan anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah sekumpulan sistem sosial yang saling berhubungan dan saling ketergantungan satu dengan lainnya.³⁰

Masyarakat sebagai sistem sosial dapat berfungsi dengan baik apabila memenuhi empat syarat, yaitu:³¹

- a. Adaptasi (*Adaptation*), sistem harus fleksibel dan dapat beradaptasi secara baik dengan lingkungan dan dapat menyesuaikan lingkungan yang ada dengan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

²⁹ Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), h. 48

³⁰ Razak, Zulkifli, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*, (Makassar : Sah Media, 2017), h.99

³¹ Ritzer, George and Goodman J., Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, Alih bahasa Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 118

- b. Pencapaian tujuan (*Goal Attainment*), sistem harus dapat secara jelas mendefinisikan tujuan dan cara mencapai tujuan–tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*Integration*), sistem harus dapat mengatur hubungan dan mengintegrasikan unsur-unsur yang menjadi komponennya.
- d. Pemeliharaan Pola (*Latency*), sistem harus saling melengkapi, memelihara dan menjaga motivasi individu dan pola–pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi individu tersebut.

3. Teori Konflik

Teori konflik menyatakan bahwa konflik merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Ada konflik antara kelas ekonomi, suku, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, atau antar ras. Ada konflik di antara negara dan kawasan “inti” yang maju dan yang kurang berkembang. Dikatakan bahwa konflik ini terjadi karena kekuasaan, kekayaan, dan prestise tidak tersedia untuk semua orang. Beberapa kelompok dikecualikan dari wacana dominan. Diasumsikan bahwa mereka yang memegang atau mengontrol barang dan jasa yang diinginkan atau yang mendominasi budaya akan melindungi kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain.

Tujuan teori konflik adalah untuk mengetahui asal mula terjadinya pelanggaran peraturan atau untuk mengetahui latar belakang perilaku menyimpang. Konflik secara sosiologis diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain, melemahkannya, menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.³² Konflik-konflik sering terjadi di tengah masyarakat, ada banyak masalah yang melatarbelakangi timbulnya konflik, masalah sosial, ras, agama, ekonomi, politik dan budaya, seringkali konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, seperti halnya terjadi pada konflik sengketa lahan. Konflik pada masyarakat secara alami tidak mungkin hilang atau dihilangkan, upaya yang dilakukan sebatas meminimalisir konflik dan dampak negatif bagi masyarakat. Pengembangan masyarakat membutuhkan teori konflik, karena teori itu membantu mendapatkan pemahaman tentang mengapa perbedaan dan persaingan tertentu berkembang di antara kelompok dan organisasi dalam suatu masyarakat. Teori konflik dapat membantu masyarakat memahami jenis dan luasnya persaingan kepentingan antar kelompok. Ini juga dapat menjelaskan distribusi kekuasaan, apakah terkonsentrasi di tangan beberapa orang atau lebih tersebar luas. Masyarakat juga dapat mengeksplorasi penggunaan konflik untuk mengganggu status quo baik melalui protes, boikot ekonomi, perlawanan damai, atau berbagai kemungkinan lainnya terutama jika kelompok atau lembaga yang bersaing menolak untuk mengubah posisi atau bernegosiasi.

4. Teori Interaksi Simbolik

Interaksionisme simbolik sangat penting untuk pengembangan masyarakat karena memberikan wawasan tentang cara orang

³² Haryanto, Dany dan Nugroho Edwi, G, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011), h.113

mengembangkan rasa berbagi makna, bahan penting untuk menumbuhkan solidaritas. Pengembangan masyarakat membantu masyarakat mengembangkan visi bersama tentang masa depan mereka, dan membantu mereka membangun rasa persatuan. Visi masyarakat muncul melalui interaksi orang dan dihubungkan melalui simbol, misalnya simbol bergambar, verbal, atau musik. Seorang interaksionis simbolik akan tertarik untuk menyatukan orang untuk mengembangkan pemahaman bersama. Misalnya, ambil kasus di mana beberapa warga telah menyatakan minatnya untuk melestarikan lahan pertanian yang berdekatan dengan kota dan telah meminta bantuan dari pengembang masyarakat. Jika seseorang menggunakan perspektif interaksionis simbolik, orang akan bertanya kepada mereka apa arti keberadaan tanah pertanian bagi mereka. Seseorang akan menghubungkannya dengan petani dan lainnya untuk melihat apakah ada makna yang berbeda atau bersaing. Melalui penggunaan teori interaksi simbolik, rasa solidaritas dapat secara bertahap dibangun dalam masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat menurut teori interaksi simbolik adalah hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya menggunakan simbol-simbol. Dalam interaksi simbolik ini, manusia memaknai situasi tertentu melalui pikiran (*mind*). Terdapat kegiatan mental dalam proses berpikir manusia, kegiatan mental ini membentuk manusia bagaimana dapat memposisikan diri dalam posisi orang lain dan memiliki kemampuan memakai simbol dengan makna sosial yang sama, sehingga manusia dapat menafsirkan arti suatu pikiran dengan tepat. Kemampuan

manusia tersebut terekspresikan dalam bahasa, secara verbal maupun bahasa non-verbal, inilah yang dinamakan dengan simbol. Selaras dengan pemikiran manusia, diri (*self*) juga merupakan suatu proses sadar yang memiliki beberapa kemampuan yang terus berkembang melalui interaksi dengan individu lain³³

Seorang interaksionis simbolik akan mengidentifikasi kelompok yang menyimpang dari makna dominan dan akan melibatkan mereka dengan kelompok lain untuk menggerakkan solidaritas masyarakat. Interaksionis simbolik juga akan menggunakan simbol untuk membangun kapasitas. Misalnya, sebuah masyarakat mungkin memilih untuk melestarikan struktur bersejarah karena mereka percaya itu indah, atau menjelaskan pentingnya dalam perjuangan buruh, kelas, ras, gender atau kepentingan lainnya. Pengembang masyarakat dapat menambah makna dengan data tentang signifikansi historis dan arsitektural. Kapasitas masyarakat dapat dibangun dengan cara lain seperti memberikan informasi tentang bagaimana menemukan dana untuk pelestarian.

5. Teori Tindakan Komunikatif

Teori tindakan komunikatif berupaya menjembatani kesenjangan antara dunia kepentingan dan praksis, teori ini mendukung terciptanya demokrasi deliberatif yaitu bentuk pemerintahan yang bebas dan equal antara sesama warga negara maupun dengan pemerintahnya yang menjustifikasi keputusan dalam proses pemberian pertimbangan antara satu

³³ Laksmi, *Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Pustabliblia : Journal of Library and Information Science, Vol 1, Number 1, Desember 2017, h. 125

dengan yang lain yang saling menerima (*mutually acceptable*) dan secara umum dapat diakses (*generally accesible*) yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan yang mengikat semua warga untuk saat ini namun terbuka terhadap perubahan di masa depan³⁴, kunci dari demokrasi deliberatif adalah kesetaraan dan tidak saling mendominasi antara kepentingan kelompok, jaringan dan individu.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya melibatkan partisipasi jaringan, kelompok, dan individu yang suaranya merupakan bagian dari dunia kehidupan. Sementara dunia kehidupan ini beroperasi dalam konteks realitas teknis, politik, dan pasar, perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip pengembangan masyarakat memerlukan partisipasi warga negara dalam menentukan masalah dan impian mereka sendiri. Jika teknisi atau kepentingan politik dan perusahaan mendominasi diskusi, keterlibatan dan partisipasi warga hanya menjadi pemikiran belaka. Jika pengetahuan teknis dibuang atau dikurangi, upaya pengembangan masyarakat mungkin tidak berhasil. Teori tindakan komunikatif Habermas dipandu oleh pertemuan pengetahuan teknis dan perusahaan dengan pengetahuan lokal dan praktis.³⁵

6. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional menurut Coleman memandang manusia sebagai aktor yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dalam teori ini setidaknya ada dua pemaksa utama tindakan yaitu : sumber daya yang

³⁴ Muzaqqi, F., *Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019). h. 55

³⁵ Hustedde, Op.cit, h. 28

terbatas dan lembaga sosial.³⁶ Manusia sebagai aktor dihadapkan pada terbatasnya sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sementara di sisi lain kebutuhan manusia tidak terbatas, dalam usaha pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas manusia dipaksa untuk melakukan pilihan yang paling rasional sehingga pemuasan terhadap satu kebutuhan dapat tercapai.

Kesenjangan antara keterbatasan sumber daya dan keinginan/kebutuhan yang tidak terbatas telah menjadi masalah klasik dalam ekonomi, dari sisi konsumen (masyarakat) keterbatasan sumber daya memaksa terjadinya pertukaran, sementara dari sisi produsen menekankan pada efisiensi produksi. Dalam pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, teori pilihan rasional memiliki peran penting, sebagai aktor (konsumen sekaligus produsen), manusia didorong untuk melakukan pilihan di antara berbagai macam alternatif yang paling menguntungkan. Selain itu, manusia harus bersikap bijak dan rasional dalam mengalokasikan sumber daya yang ada dan dalam melakukan pilihan rasional manusia dibatasi oleh norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga, masyarakat maupun negara dan lembaga sosial lainnya.

7. Teori Strukturasi Giddens

Teori klasik fungsionalisme struktural, teori konflik, dan teori pilihan rasional merupakan konsep yang sangat penting untuk membangun

³⁶ Wrihatnolo R., Randy dan Dwidjowijoto Nugroho, Riant, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Pandauan Untuk pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007), h. 104

kapasitas masyarakat sedangkan teori kontemporer yang berubah-ubah tentang modal sosial, tindakan komunikatif, dan teori klasik interaksionisme simbolis penting untuk menciptakan atau memperkuat solidaritas. Dalam teori ini memandang bahwa manusia sebagai agen-agen individual saling berhubungan dengan manusia sebagai struktur sosial, tingkah laku agen sehari-hari adalah pembentuk struktur sosial. Teori strukturasi dalam pengembangan masyarakat menduduki peran yang sangat penting sebagai jembatan perbedaan teori makro tentang struktur dan konflik, dengan teori mikro tentang perilaku individu dan kelompok.

Pengembangan masyarakat menjadi sebuah kebutuhan dalam upaya meningkatkan kapasitas baik secara komunal maupun secara individu, pengembangan masyarakat tidak terlepas dari teori sumber daya manusia, manusia dipandang sebagai sumber daya jika memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumberdaya manusia adalah paduan kemampuan fisik dan kemampuan pikir yang dimiliki manusia, perilaku dan sifat manusia sangat dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungannya, sementara prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Sumberdaya manusia merupakan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia itu sendiri sehingga dengan potensi itu mampu berperan sebagai makhluk sosial yang adaptif dengan makhluk lainnya dan transformatif serta mampu mengelola dirinya sendiri maupun mengelola potensi sumber daya lainnya untuk

tercapainya kesejahteraan hidup dalam tatanan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan³⁷.

Pengembangan Masyarakat telah berkembang, meliputi berbagai macam pekerjaan yang bersifat pelayanan sosial (*charity*), dan telah dilakukan secara individu maupun melalui organisasi LSM. Umumnya pekerjaan sosial tersebut dilakukan secara informal dan berorientasi kepedulian, sebagai bentuk terjadinya kesenjangan antara pngembang dengan masyarakat yang butuh pengembangan, bentuk-bentuk pogram pelayanan sosial sangat bervariatif dan umumnya bersifat gratis seperti pendampingan anak, pelayanan bimbingan mental dan rohani. Upaya pekerja sosial dianggap bukan pekerjaan profesional sementara realitas yang terjadi adalah pengembangan masyarakat sangat dibutuhkan. Pengembangan masyarakat sangat identik dengan pekerjaan sosial, walaupun demikian pengembangan masyarakat belum menjadi ciri pokok praktek pekerjaan sosial. Realitasnya pengembangan masyarakat hanya menjadi salahsatu bagian dari pekerjaan profesi lain, seperti perencanaan kota dan pengembangan pemukiman. Pengembangan masyarakat lebih sering dikerjakan oleh para sukarelawan, aktifis sosial dan aktifis pembangunan yang tidak dibayar daripada profesi khusus sebagai pengembang. Dari hal tersebut muncul perdebatan panjang mengenai apakah pengembangan masyarakat dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Meski terjadi perdebatan, pengembangan masyarakat memiliki tempat khusus dalam

³⁷ Bukit, Benjamin., dkk., *Pengembangan Sumberdaya Manusia : Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2017), h. 2

khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial.³⁸

Dalam konteks pembangunan, pengembangan masyarakat dipandang sebagai pendekatan pembangunan yang bersifat *bottom up* karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia dan sebagai modal sosial adat istiadat, tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Pengembangan masyarakat sebagai pendekatan metode pembangunan berangkat dari realitas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, oleh karena itu pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Untuk menjamin pengembangan masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam pengembangan masyarakat perlu memperhatikan empat prinsip pengembangan masyarakat yaitu:³⁹

- 1) Pengembangan masyarakat memihak pada masyarakat miskin yang lemah dan tidak berdaya, mendorong keadilan sosial dan hak-hak warga sipil, bertindak secara kolektif dalam keanekaragaman ras, agama, budaya dan suku bangsa.
- 2) Pengembangan masyarakat mengubah struktur yang diskriminatif terhadap golongan lemah dan terlibat dalam merekonstruksi konflik. Pengembangan masyarakat memiliki tujuan untuk mengubah struktur yang diskriminatif, memaksa dan menindas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini pengembangan masyarakat membangkitkan,

³⁸ Mayo, M., *Community Work*, dalam Hanvey and Philpot (eds), *Practising Social Work*, (London: Routhledge, 1994)

³⁹ Suharto, Edi., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.37-40

menghadirkan informasi yang tidak menyenangkan dan kadang-kadang mengganggu sebagai bentuk rekonstruksi konflik. Di sini pengembangan masyarakat melengkapi kegiatannya dengan gerakan sosial yang baru seperti hak asasi manusia dan gerakan perdamaian.

- 3) Pengembangan masyarakat bersifat membebaskan, membuka aksesibilitas masyarakat dan menumbuhkan demokrasi yang bersifat partisipatori. Pembebasan atau liberasi adalah sebuah respon dan penentangan terhadap kekuasaan, aksi-aksi perbudakan dan penindasan. Pembebasan didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan otonomi. Pembebasan melibatkan perjuangan menentang dan membebaskan dari orang-orang, ideologi, dan struktur yang sangat berkuasa.
- 4) Pengembangan masyarakat meningkatkan akses kepada program-program pelayanan masyarakat, oleh karena itu program-program Pengembangan masyarakat ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Lingkungan fisik yang diciptakan melalui pengembangan masyarakat adalah lingkungan yang bersahabat dan lebih bersifat informal daripada birokratis, formal dan tertekan.

Sebagai sebuah proses pengembangan masyarakat adalah siklus yang tidak berhenti, proses mengembangkan diri akan terus berlanjut menyesuaikan kebutuhan yang terus berkembang, ketika telah mencapai satu tujuan maka akan tumbuh tujuan-tujuan selanjutnya. Proses pengembangan masyarakat berawal dari perencanaan sampai dengan evaluasi, proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pengembangan, dan sejalan dengan

pembangunan yang bersifat *bottom-up*, proses pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut :⁴⁰

- a. *Establish and organizing group*
- b. *Creating mission*
- c. *Identification and make a decision who's community stakeholders*
- d. *Collect and analyze information*
- e. *Develop an effective communication process*
- f. *Expand the community organization*
- g. *Creating vision statement*
- h. *Creating strategic plan*
- i. *Identify the leadership and establish a plan management team*
- j. *Implement the plan*
- k. *Review and evaluate the planning outcomes*
- l. *Celebrate the success*
- m. *Create new goals and objective as needed*

Proses pengembangan masyarakat dimulai dengan membentuk team gugus tugas yang akan melaksanakan program pengembangan, team ini mengidentifikasi masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Identifikasi ini penting untuk menentukan tema pengembangan yang paling tepat, identifikasi masalah dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan metode survey, observasi, *Focus Group Discussion* dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pengembangan agar dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan pengembangan, tujuan yang terukur menjadi parameter dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Setelah tujuan dirumuskan maka dilanjutkan pada tahap penyusunan program dengan melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat, program dan sasaran program disusun dengan memperhatikan penggunaan secara efektif dan efisien sumber daya yang dimiliki, baik berupa dana maupun sumber daya manusia.

⁴⁰ Vincent II W., John, *Community Development Practice : An Introduction to Community Development*, ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. (New York: Routledge, 2009). h. 63

Implementasi atau pelaksanaan program pengembangan masyarakat adalah proses yang krusial, dilaksanakan dengan strategi-strategi yang dipilih disesuaikan dengan kondisi masyarakat, keberhasilan pelaksanaan program pengembangan sangat tergantung dengan penerimaan masyarakat terkait ketepatan dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan penetapan saluran komunikasi yang paling efektif. Pada proses implementasi, monitoring secara periodik harus dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan dan secara cepat dapat mengambil keputusan untuk mengatasi kendala tersebut, monitoring berorientasi pada proses dan dilakukan ketika program sedang berjalan. Keberhasilan pencapaian tujuan pengembangan masyarakat dapat diketahui setelah melakukan review dan evaluasi, beberapa tujuan mungkin tercapai, terlambat dicapai atau bahkan tidak dapat dicapai, hasil review dan evaluasi digunakan untuk menentukan apakah program dapat dilanjutkan, apakah perlu merumuskan visi, misi dan tujuan baru atau apakah program perlu dihentikan.

Pengembangan masyarakat dalam pelaksanaannya menurut Christenson (1989) menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu : (1) *self-help*, (2) *technical assistance* dan (3) *conflict*.⁴¹ Menurut Robinson (2011) ketiga pendekatan pengembangan masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam tabel sebagai berikut :

⁴¹ Lyon, Larry and Driskell, Robyn., *The Community in Urban Society*, second edition, (Illinois : Wafeland Press, 2012), h. 110

Tabel 2.1. The Comparison of Self-help, Technical Assistance and Conflict⁴²

Factor	Self-Help	Technical Assistance	Conflict
Image of society	- Dehumanized - Mechanical	Bureaucratic organization with authority figures	Groups constantly struggle to maintain or add to their power base
Image of individual	Inherently good but goodness is suppressed	System-defined players and roles	Power is the most basic of all resources
Assumption examples	People have the right and ability to identify and solve collective problems	Science provides means to solve problems	Power is the most basic of all resources
Core Problem to be addressed	Capacity of people to take collective action	Capacity to harness science to solve human problems	Concentration of power in the hands of a few persons
Examples of action goals	Community capacity building	Technical problem solving	Redistribution of power

Sumber : Robinson, 2011 (diolah)

Pendekatan *self-help* menggunakan secara murni kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, baik berupa dana maupun keahlian dalam melakukan perubahan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dimana masyarakat bertanggungjawab penuh terhadap apa yang dibutuhkan dan bagaimana tujuan dapat dicapai. Menurut Green (2011), pendekatan *self-help* tidak terlalu mementingkan pencapaian hasil dan dampak langsung, tetapi lebih tertarik untuk mempersatukan masyarakat dalam mengidentifikasi tujuan bersama. Melalui proses ini, masyarakat memperkuat kapasitasnya dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya yang dihadapi saat ini, tetapi juga yang mungkin akan mereka hadapi di masa depan.⁴³ Dalam pengidentifikasian tujuan dan kebutuhan bersama (*need assessment*) tentu harus memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat dan masyarakat harus

⁴² Robinson W., Jerry and Fear, Frank, *The Technical Assistance Approach : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*, ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green (California: Sage, 2011), h. 72

⁴³ Green Paul, Gary., *The Self-help Approach to Community Development : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*, ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green (California: Sage, 2011), h. 88

memiliki keyakinan bahwa potensi tersebut dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Peran pengembangan masyarakat adalah untuk memfasilitasi, bukan untuk membimbing atau mengarahkan, proses yang membantu mencapai tujuan ini. Fasilitator mengatur upaya dan proses masyarakat yang memungkinkan warga berkumpul dan mengidentifikasi strategi untuk mencapai tujuan kolektif mereka. Selain itu, fasilitator membantu mengidentifikasi sumber daya potensial yang akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangani peluang mereka.⁴⁴

Model pengembangan masyarakat yang paling sering digunakan melalui pendekatan *self-help* adalah *Asset Based Community Development (ABCD)*, model ABCD adalah model pengembangan yang berkelanjutan yang menekankan pada kekuatan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, berbeda dengan model tradisional (*need based community development*) yang menekankan pada masalah dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan masyarakat berbasis aset dimulai dengan pengidentifikasian sumber daya yang dimiliki masyarakat, aset dalam konteks ABCD menurut Haines (2014) ada tiga, yaitu⁴⁵ : modal fisik, modal manusia dan modal sosial. Modal yang bersifat fisik terdiri dari: jalan, gedung, infrastruktur, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu masyarakat, modal fisik juga menjadi atribut yang menjadi ciri utama suatu masyarakat seperti jalan, rel, air dan saluran drainase, lingkungan hunian, taman, kawasan industri, sekolah, gedung pemerintah, universitas atau perguruan tinggi, dan sebagainya. Modal manusia diartikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan, penting untuk disadari bahwa tidak hanya

⁴⁴ *Ibid*, h.89

⁴⁵ Anna Haines, *Asset-Based Community Development : An Introduction to Community Development*, ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. (New York: Routledge, 2009). h. 42

orang dewasa yang menjadi bagian dari persamaan modal manusia, tetapi anak-anak dan remaja juga berkontribusi. Modal sosial mengacu pada hubungan sosial yang terdapat dalam sebuah komunitas dan dapat merujuk pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dibangun. Pengembangan masyarakat berbasis aset adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik tidak hanya dalam arti ekonomi, tetapi melalui pengembangan semua bentuk modal yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang.⁴⁶

Pendekatan selanjutnya dalam pengembangan masyarakat adalah pendekatan bantuan teknis/*technical assistance approach*, berbeda dengan pendekatan *self-help* yang fokus pada pendampingan dan pengembang masyarakat berperan hanya sebagai fasilitator, sementara pada pendekatan ini fokus pada pemberian bantuan teknis, bantuan teknis sering digunakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga profesional dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (misalnya bantuan teknis perbaikan sistem sanitasi dan drainase, pembangunan rumah sehat dan sebagainya), oleh karenanya pendekatan bantuan teknis ini lebih bersifat vertikal. Pendekatan bantuan teknis memiliki asumsi bahwa tidak semua sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat dapat tersedia untuk memecahkan semua masalah, seringkali dibutuhkan bantuan dari luar (seperti teknologi, dana, bimbingan) pada saat sumber daya lokal tidak tersedia atau tidak mencukupi. Bantuan teknis karena sifatnya yang vertikal memiliki kelemahan, menurut McKnight (1995) dalam Green (2011), bantuan teknis biasanya didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat mempunyai masalah dan profesional memiliki

⁴⁶ Ibid., h. 47

solusinya. Bantuan teknis yang diberikan oleh para profesional maupun ahli, kemudian, menciptakan masyarakat yang memiliki ketergantungan dan secara terus menerus membutuhkan bantuan lanjutan. Hubungan ini, bertentangan dengan tujuan pembangunan kapasitas masyarakat yaitu kemandirian. Lembaga pemerintah dan profesional juga dapat menciptakan ketergantungan dengan tidak mendorong kontrol masyarakat atas layanan dan proyek yang mereka laksanakan. Para birokrat dan pejabat publik seringkali memandang kontrol dan partisipasi masyarakat terlalu memakan waktu atau bahkan idealis.⁴⁷

Pengembangan masyarakat menuntut interaksi yang intens antar individu, dalam proses interaksi, konflik pasti tidak dapat dihindari dan hal itu wajar. Pendekatan konflik didasarkan pada fakta bahwa pada proses pengembangan masyarakat melibatkan individu-individu yang memiliki tujuan, nilai, minat, nilai dan gaya berkomunikasi yang berbeda-beda, sementara individu-individu tersebut dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Konflik secara garis besar dibagi menjadi lima kelompok, yaitu :⁴⁸

1. *Interpersonal conflicts*, adalah konflik yang terjadi antar individu dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik yang lebih tinggi.
2. *Intergroup conflict*, adalah konflik yang terjadi antar kelompok dalam masyarakat, misalnya dalam merespon suatu masalah terdapat

⁴⁷ Green, Op.cit., h.89

⁴⁸ Robinson W., Jerry and Smutko Steven, L., *The Role Of Conflict In Community Development : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*, ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green (California: Sage, 2011), h. 125

kelompok yang setuju, tidak setuju, dan kelompok yang tidak peduli.

Konflik ini terjadi karena ada hambatan komunikasi.

3. *Interorganizational conflict*, adalah konflik yang terjadi antar organisasi pengembang. Konflik ini cukup umum terjadi di antara lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan nirlaba bahkan saat mereka bekerja untuk tujuan umum yang sama.
4. *Intercultural conflict*, adalah konflik yang disebabkan perbedaan antar budaya berkenaan dengan cara mereka memandang dan menerima perbedaan kekuasaan, pandangan mereka terhadap individualisme versus kolektivisme, keinginan mereka untuk hasil atau kepuasan jangka panjang versus jangka pendek, dan penerimaan atau penghindaran risiko dan ketidakpastian
5. *International conflict*, adalah konflik lintas negara yang mempengaruhi masyarakat pada tingkat lokal.

Pendekatan konflik dalam pengembangan masyarakat sering digunakan untuk resolusi konflik yang terjadi di masyarakat, keberhasilan resolusi konflik tergantung pada ketepatan dalam pengidentifikasian sumber-sumber konflik. Sumber konflik menurut Katz (1965) dalam Fisher (2006) ada tiga⁴⁹, yaitu: (1) konflik ekonomi, (2) konflik nilai, dan (3) konflik kekuasaan. Sumber konflik secara ekonomi adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Setiap pihak ingin mendapatkan yang terbaik, serta perilaku dan emosi masing-masing diarahkan untuk tujuan maksimalisasi keuntungan. Konflik nilai melibatkan

⁴⁹ Fisher, Ron, *Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution*, (The International Peace and Conflict Resolution School of International Service The American University, 2006), h.1

ketidakcocokan dalam cara hidup, ideologi - preferensi, prinsip dan praktik yang diyakini orang. Konflik kekuasaan terjadi ketika masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memaksimalkan jumlah pengaruh yang diberikannya dalam hubungan dan lingkungan sosial.

Pengembangan masyarakat dengan tema resolusi konflik dapat menggunakan tiga pendekatan untuk memecahkan masalah konflik, baik itu konflik agama, ras, dan sosial seperti yang dikemukakan oleh Blake, Shepard & Mouton (1964) dalam Fisher (2006), yaitu : *win-lose approach*, *lose-lose approach*, and *win-win approach*.⁵⁰ *Win-lose approach* (pendekatan menang-kalah) adalah memaksa pihak lain untuk menyerah. Strategi yang dilakukan melalui mekanisme yang dapat diterima secara sosial seperti suara terbanyak, kewenangan pemimpin, atau penetapan hakim. *Lose-lose approach* (pendekatan kalah-kalah), digunakan untuk mengatasi pembagian sumber daya yang jumlahnya terbatas, setiap pihak mendapatkan sebagian dari apa yang diinginkannya, titik tekan pendekatan ini adalah kompromi. *Win-win approach* (pendekatan menang-menang), pendekatan menang-menang adalah upaya secara sadar dan sistematis untuk memaksimalkan tujuan kedua belah pihak melalui pemecahan masalah kolaboratif. Metode ini berfokus pada kebutuhan dan kendala kedua belah pihak.

2. Pengembangan Masyarakat Islam

Pengembangan masyarakat Islam dewasa ini perlu mendapat perhatian lebih mengingat kondisi umat yang masih jauh tertinggal dalam seluruh sendi kehidupan, meliputi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kebutuhan akan

⁵⁰ Ibid, h.4

pengembangan juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat Islam yang jauh dari prinsip-prinsip ajaran Islam, ada satu fenomena yang menarik sekaligus menimbulkan keprihatinan ketika prinsip Islam justru tumbuh subur pada masyarakat non Islam, banyak fakta menunjukkan masyarakat “barat” jauh lebih Islami dibandingkan dengan masyarakat Islam. Dalam pengembangan masyarakat Islam perlu memahami masyarakat Islam itu sendiri. Menurut Yusuf Qardhawi masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang spesifik. Masyarakat yang memiliki orientasi ketuhanan (*rabbani*), bersifat manusiawi (*insani*), menempatkan akhlak di posisi yang tinggi (*akhlaqi*), dan proporsional (*tawazun*). Masyarakat Islam adalah suatu tatanan kehidupan yang dibimbing oleh akidah, disucikan oleh ketauhidan dan ibadah, dituntun oleh pemahaman ke-Islam yang shahih dan komprehensif, digerakkan oleh semangat, diikat oleh akhlak, diatur oleh undang-undang, serta dipimpin segenap sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya.⁵¹ Pendapat Yusuf Qardhawi menekankan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat Islam adalah masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam, pendapat ini berbeda dengan pendapat Sayyid Qutb, menurut Sayyid Qutb, Masyarakat Islam dipandang sebagai masyarakat yang universal, tidak rasial, tidak nasional dan tidak terbatas di dalam batas-batas lokasi secara geografis. Masyarakat Islam terbuka untuk seluruh umat manusia tanpa memandang jenis, warna kulit maupun bahasa, juga tidak memandang agama dan keyakinan atau aqidah.⁵² Universalitas dalam pandangan Sayyid Qutb mengacu pada hak dasar manusia itu sendiri, nilai-nilai yang

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2018), h.3

⁵² Sayyid Qutb, *Masyarakat Islam*, Terj. (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), h.70

terkandung dalam universalitas seperti kesetaraan dan keadilan menjadi poin penting dalam mendeskripsikan Masyarakat Islam.

Pengembangan Masyarakat Islam jika ditinjau dari obyeknya termasuk dalam sistem dakwah. Sasaran dakwah sangat beragam meliputi problematika yang terjadi pada tingkat individu maupun masyarakat, dalam ilmu dakwah terdapat enam konteks sasaran/ *mad'u*, yaitu dakwah diri sendiri (*da'wah an-nafsiyah*), dakwah antar individu (*da'wah al-fardiyyah*), dakwah dengan sasaran kelompok yang terorganisir (*da'wah al-fi'ah*), organisasi (*da'wah al-hijbiyah*), antar etnis (*da'wah as-syu'ubiyah wa qobailiyyah*), komunitas yang bersifat massal (*da'wah al-ummah*). Dengan melihat sasaran dakwah, maka pengembangan masyarakat Islam termasuk di dalamnya karena memiliki sasaran kelompok masyarakat.⁵³

Dalam sistem dakwah, proses Pengembangan Masyarakat Islam menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: (1) *dakwah fi'ah*, yaitu proses dakwah terhadap sekelompok *mad'u* yang dilakukan secara tatap muka, dan berdiskusi secara dialogis dengan kelompok kecil, maupun kelompok *mad'u* yang terorganisir seperti sekolah/madrasah, majelis taklim, dan pesantren; (2) *dakwah hizbiyah* atau *jam'iyah*, yaitu proses dakwah yang dilakukan oleh *da'i* dengan atribut lembaga atau atribut organisasi dakwah, kemudian memberikan dakwah kepada anggota lembaga sendiri atau orang lain di luar anggota lembaga dan organisasi itu sendiri; (3) *dakwah ummah*, seorang *da'i* yang memberikan dakwah kepada banyak orang melalui media fisik seperti mimbar, media massa cetak dan elektronik dengan metode yang bersifat monologis, baik secara tatap muka maupun tidak tatap muka;

⁵³ Mukhlis Aliyuddin, *Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah*, (Journal Ilmu Dakwah Vo. 4 No. 14 Juli-Desember 2009) h. 778

dan (4) *dakwah syu'ubiyah qabailiyah*, seorang *da'i* dengan etnis, budaya dan bangsa tertentu memberikan dakwah kepada masyarakat yang beretnis, berbudaya dan berbangsa yang berbeda.⁵⁴

Pengembangan Masyarakat Islam sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sangat relevan dengan dengan konsep masyarakat Madani (*Civil Society*) yaitu sebuah lingkungan dimana didalamnya masyarakat menciptakan kreatifitas, mengatur dan menggerakkan diri mereka sendiri.⁵⁵ Menurut Din Syamsuddin masyarakat madani atau *civil society* secara umum bisa diartikan “sebagai suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya secara bersama-sama”.⁵⁶ Ciri-ciri masyarakat yang dikemukakan oleh Din Syamsudin identik dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakat yang heterogen, masyarakat yang heterogen itu sendiri merupakan ciri masyarakat “kota”, hal ini sejalan dengan bahwa masyarakat madani berawal dari istilah “*al-mujtama' al-madani*” yang memberi penegasan bahwa masyarakat madani adalah mengandung dua unsur makna yaitu masyarakat kota dan masyarakat yang beradab”.⁵⁷ Istilah masyarakat sipil (*Civil Society*) muncul pertama kali pada pemikiran politik modern Eropa masa awal (abad 17 dan 18),

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 784

⁵⁵ Herdiawanto, Heri., Wasitaatmadja Fuad, Fokky., dan Hamdayama, Jumanta., *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), h.270

⁵⁶ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Penerbit Al-Mawardi Prima, 2000), h. VII.

⁵⁷ Andi Suryadi Cula, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 8.

para ahli teori politik pada masa awal ini menempatkan masyarakat sipil sebagai organisasi yang beradab lawan dari apa yang mereka pandang sebagai masyarakat primitif dan barbar. Pada awal abad 19, Hegel memberikan konsep yang lebih tepat tentang masyarakat sipil. Menurut Hegel Masyarakat Sipil adalah tempat dimana orang dapat belajar cara bekerja dan hidup bersama, kemudian dengan pengetahuan ini dapat menggunakannya untuk bekerja membangun negara.⁵⁸

Masyarakat Madani dikonstruksi dari bahasa yang “Islami” dengan merujuk pada kata *al-din*, yang pada umumnya diartikan sebagai agama. Masyarakat Madani berkaitan erat dengan makna *al-tamaddun* (peradaban). Kedua istilah (*al-din* dan *al-tamaddun*) menyatu kedalam pengertian *al-madinah* (kota). Berdasarkan hal itu maka masyarakat Madani mengandung tiga hal pokok, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan. Agama adalah sumber, prosesnya adalah peradaban, dan hasilnya adalah masyarakat kota.⁵⁹ Masyarakat “kota” adalah masyarakat yang mandiri, dinamis, praktis, toleran, berwawasan luas dan lebih sejahtera. Masyarakat kota merujuk pada definisi masyarakat madani adalah masyarakat *khairu ummah*, secara etimologis, kata *khair* memiliki arti sebaik-baik atau paling baik atau yang terbaik dan kata *ummah* memiliki arti jamaah atau kelompok. Jika dipahami sekilas, *khairu ummah* berarti sebaik-baiknya kelompok atau kelompok terbaik atau jamaah paling baik.⁶⁰ *Khairu ummah* diserukan Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 110:

⁵⁸ Stefano Harney and Rita Olivia, *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*, (Geneva: International Labour Office, 2003), h.10

⁵⁹ M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999), h. 146

⁶⁰ Ahmad Labib Majdi, *K.H. Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah*, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Voi.1 No.1, 2017, h. 78

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

Berdasarkan ayat di atas, *khairu ummah* merupakan bentuk ideal masyarakat Islam yang bercirikan pada integritas keimanan, orientasi dan komitmen untuk berkontribusi secara positif kepada kemanusiaan yang universal dan berpegang teguh pada kebenaran dengan mekanisme *amr bi al-ma`ruf nahi`an al-munkar*.⁶¹ Secara sekilas dapat dikatakan bahwa *khairu ummah* adalah sekelompok umat yang tidak hanya memiliki kesalehan individu saja, melainkan juga kesalehan sosial.⁶²

Pada definisi lain Toto Tasmara memasukkan konsep kerja dan etos kerja sebagai prasyarat menjadi *khairu ummah*. Menurut Toto Tasmara (2002) bekerja dapat dipandang sebagai usaha manusia secara sungguh-sungguh, dengan menggunakan secara maksimal aset yang dimiliki, daya pikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan diri atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menjalankan tugas sebagai khalifah di dunia dan dapat menempatkan

⁶¹ Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Quran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), h. 115

⁶² Ahmad Labib Majdi, *Op.cit.*, h.78

dirinya sebagai bagian dari masyarakat terbaik (*khairu ummah*).⁶³ Definisi kerja secara umum adalah segala usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara dalam ekonomi Islam kerja adalah kewajiban dan merupakan bagian dari ibadah. Dalam bekerja, manusia didorong oleh produktifitas kerja dan etos kerja, produktifitas adalah hasil kerja sementara etos kerja adalah sikap mental dalam bekerja. Islam membagi pengertian kerja dalam dua bagian. Pertama, secara umum kerja tidak hanya menyangkut persoalan dunia semata akan tetapi juga menyangkut persoalan akhirat. Definisi kerja adalah usaha-usaha yang dilakukan manusia dengan menggunakan seluruh asetnya baik yang bersifat aset fisik maupun aset non fisik yang ditujukan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan akhirat. Pengertian kerja dalam Islam sangat luas, pertama, kerja mencakup seluruh pengerahan potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Kedua, definisi kerja sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kerja adalah kewajiban setiap manusia dan menentukan derajatnya dihadapan Allah SWT maka dalam melakukan setiap pekerjaan, etika kerja merupakan hal utama yang menjadi perhatian. Etika kerja seperti bekerja secara baik, jujur dan amanah, upah yang sesuai, proporsional, professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang dilarang oleh Syari'at Islam.

Khairu ummah Jika dikaitkan dengan produktifitas dan etos kerja, adalah manusia yg produktif dan memiliki etos kerja tinggi. Hal ini sejalan dengan tuntutan

⁶³ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.

untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan mampu mengubah nasib hidupnya sendiri seperti firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya :

“.....Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.....”

Janji Allah dalam ayat di atas sangat jelas, untuk dapat merubah keadaan diri sendiri dibutuhkan manusia yang produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam konteks pengembangan masyarakat dimana perubahan di inisiasi dari masyarakat itu sendiri, maka kemampuan masyarakat dalam menciptakan kreatifitas, inovasi dan kapasitas menjadi hal yang sangat penting yang tidak akan terlepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri.

Pada hakikatnya kualitas SDM adalah berbanding lurus dengan pengetahuan yang manusia miliki, pengetahuan ini berkaitan erat dengan bagaimana cara manusia dapat memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki untuk mempertahankan hidupnya di dunia. Di sisi lain pengetahuan juga menentukan atau menjadi pembeda dengan makhluk lain, dengan pengetahuan manusia dapat meningkatkan harkat dan martabatnya. Kualitas SDM dalam dalam pandangan Islam bermuara pada bagaimana tingkat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan taqwa yang sebenar-benarnya adalah manusia harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang-Nya. Tingkat ketaqwaan manusia menjadi ukuran kualitas manusia di hadapan Allah SWT, karena dalam Taqwa terwujud kepatuhan terhadap norma dan etika Islam yang diaplikasikan dalam setiap sendi kehidupan dan selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dalam upaya memenuhi kebutuhan, sesuai dengan dimensi Taqwa, manusia harus mampu memisahkan pekerjaan-pekerjaan yang diperbolehkan oleh agama dan menjauhi pekerjaan yang dilarang oleh agama. Pekerjaan merupakan sebuah tugas yang menyerupai kewajiban yang dilakukan oleh individu saat dibutuhkan.⁶⁴ Islam sangat menjunjung tinggi nilai kerja, dan bekerja itu sendiri adalah ibadah, oleh karena itu SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki etos kerja yang tinggi. Allah berfirman dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

artinya :

⁶⁴ Abdul Hamid Mursi, *SDM yang Produktif : Pendekatan Alqur'an dan Sain*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 21

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Pada ayat di atas manusia diperintah setelah selesai melaksanakan ibadah untuk bertebaran di muka bumi bekerja mencari rezeki yang halal, dan selalu mengingat Allah agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan. Ketika masyarakat dunia menempatkan status sosial dan ekonomi di tempat yang tinggi, Islam justru sangat menghargai orang yang berilmu, pedagang, tukang dan pengrajin. Sebagai manusia biasa mereka tidak diunggulkan melalui status sosial dan ekonomi dari yang lain, karena Islam menganut nilai persamaan di antara sesama manusia di hadapan manusia, yang membedakan antara satu manusia dengan yang lain adalah amal saleh tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Def

3. Pengembangan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi

Community development dan *economic development* memiliki hubungan yang sangat erat, tujuan pengembangan masyarakat adalah menghasilkan aset dan aset tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sedangkan tujuan pembangunan ekonomi adalah memobilisasi aset untuk memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kedua definisi merujuk ke aset yang sama yaitu : manusia, keuangan, dan fisik (lingkungan atau sumber daya alam). Definisi holistik yang lebih modern dari pembangunan ekonomi mencakup tidak hanya kekayaan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi meningkatkan kualitas kehidupan dan standar hidup untuk semua masyarakat.⁶⁵ Menurut Gallardo (2015) pembangunan ekonomi

⁶⁵ Rhonda, Philips. And Pittman H., Robert, loc.cit, h.12

sering dikaitkan dengan dua tujuan: (1) penciptaan lapangan kerja dan kekayaan dan (2) peningkatan kualitas hidup. Tujuan pertama biasanya mengarah ke yang kedua, tetapi, umumnya, fokusnya adalah pada aspek bisnis masyarakat. Jadi perbedaan antara pembangunan masyarakat dan ekonomi bermuara pada satu pendekatan (pengembangan masyarakat) yang berfokus pada isu-isu masyarakat yang lebih luas daripada pekerjaan dan bisnis, sementara pendekatan lain (pembangunan ekonomi) sebagian besar berfokus pada pekerjaan dan bisnis. Keduanya adalah proses yang berlangsung di sebuah masyarakat atau wilayah.⁶⁶ Perbedaan antara kedua istilah tersebut hanya cara pandang terhadap aset, pada pengembangan masyarakat aset dapat dihasilkan, seperti keterampilan dan keahlian melalui program pelatihan, dan digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan dunia yang dinamis, sementara dalam pembangunan ekonomi yang dimaksud dengan mobilisasi aset adalah pengerahan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

Paradigma pembangunan ekonomi dewasa ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih mengarah pada keberlanjutan (*sustainability economic development*), yang memiliki perhatian pada pemerataan, keadilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bertujuan mengurangi kemiskinan tetapi yang lebih penting adalah mengurangi penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang serius karena banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran

⁶⁶ Gallardo, Roberto., *Community Economic Deveelopment : Key Concepts*, (USA : Mississippi State University, 2015), h.3

setan kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*), menurut Ezeala-Harrison (1996) lingkaran setan kemiskinan memiliki dua dimensi yaitu :⁶⁷ *the demand side and the supply side*, pada sisi penawaran (*supply*) rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi menyebabkan rendahnya produktifitas dan pada akhirnya produktifitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan. Pada sisi permintaan (*demand*), rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya permintaan, permintaan yang rendah menghambat produksi dan investasi, dan rendahnya produktifitas dan investasi menyebabkan rendahnya pendapatan. Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian faktor yang saling mempengaruhi yang menciptakan kondisi dimana masyarakat tidak berdaya, terjebak dan sulit keluar dari masalah kemiskinan tersebut. Untuk dapat memutus lingkaran setan kemiskinan, salahsatu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salahsatu strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan secara resmi memasuki ranah ekonomi pembangunan dengan karya Amartya Sen, *Development as Freedom*, Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sejati harus memperluas pilihan masyarakat. Dengan kata lain, pengembangan bukan hanya pengumpulan aset dan pendapatan, tapi lebih dari itu pengembangan adalah pengumpulan dari apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan seseorang. Melampaui gagasan yang lebih sederhana tentang modal manusia dan sosial, Sen menggambarkan pembangunan sebagai proses yang meningkatkan kemampuan orang, kebebasan mereka untuk berfungsi, mengingat

⁶⁷ Ezeala-Harrison, Fideli., *Economic Development : Theory and Policy Applications*, (London : Praeger, 1996), h.109

preferensi pribadi mereka. Sen juga menekankan heterogenitas individu dalam kemampuan mereka untuk menanggapi kebijakan pembangunan, dan oleh karena itu Sen berpendapat bahwa, khususnya, orang miskin perlu terlibat dalam kebijakan pembangunan, karena mereka perlu merasa bahwa mereka memiliki andil atas hasil yang diperoleh. Ini membutuhkan pemberdayaan. Perilaku pertumbuhan ekonomi, yang mencoba menyatukan konsep psikologis dan ekonomi mikro perilaku manusia dalam menghubungkan dengan pasar untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik, membawa konsep pemberdayaan lebih jauh ke dalam arus utama pemikiran pembangunan ekonomi.⁶⁸

Pemberdayaan (*empowerment*) secara konsep berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan)⁶⁹. Definisi pemberdayaan dapat dilihat dari proses, tujuan dan cara yang dilakukan. Menurut Jim Ife tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lemah dan kurang beruntung. Sementara itu, menurut Person, pemberdayaan dipandang sebagai proses dengan mana masyarakat menjadi kuat dan mampu mempengaruhi serta mengontrol kejadian-kejadian atau kondisi-kondisi serta institusi yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin, pemberdayaan

⁶⁸ Fox, Louise. And Romero, Carolina., *Concept and Measurement of Women's Economic Empowerment*, (World Bank Group : Social Protection and Labor Global Practice Group, 2017), h. 4

⁶⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h.57

menunjuk pada upaya mengalokasikan kembali kekuasaan melalui rekonstruksi struktur sosial.⁷⁰

Pemberdayaan secara umum dapat disimpulkan sebagai serangkaian kegiatan dalam upaya untuk menumbuhkan kekuasaan, kemampuan, dan keberdayaan masyarakat golongan rentan dan lemah, termasuk kemiskinan yang dialami oleh individu-individu, sehingga mereka memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik, ekonomi, maupun kebutuhan sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Cara pemberdayaan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan motivasi, memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kapasitas dan yang paling penting menyadarkan mereka terhadap potensi sumber daya yang dimiliki dan potensi pengembangannya.

4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Program Desa Binaan

Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Definisi Desa, dengan keluarnya Undang-undang tentang desa telah berubah maknanya, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

⁷⁰ Ibid, h. 60

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian desa tersebut telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Desa tidak identik dengan pemerintah desa dan kepala desa. Desa mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.⁷¹ Dalam konteks pembangunan desa, dengan keluarnya Undang-undang Desa mengalami perubahan paradigma. Paradigma lama bersifat *state centric*, paradigma baru bersifat *socio-centric*, perbedaan paradigma tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :⁷²

⁷¹ Eko Sutoro, Dkk., *Desa Membangun Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), h. 34

⁷² *Ibid*, h.37

Tabel 2.2. Perbandingan Paradigma Pembangunan Perdesaan

No	Penelitian	Relevansi
1	Disertasi: Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin (Sungkowo Edy Mulyono, 2011)	Pemberdayaan ekonomi lokal yang akan dievaluasi menitikberatkan pada pendidikan non formal seperti tema pelatihan-pelatihan pada masyarakat des binaan UIN Raden Intan
2	Disertasi: Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup (Nugroho Pratomo, 2015)	Basis pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia sebagai usulan pengembangan model pemberdayaan ekonomi lokal
3	Disertasi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru (Yusuf Gunawan, 2017)	Penerapan konsep desa membangun melalui partisipasi masyarakat dalam program desa binaan/mitra
4	Disertasi: Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor (Haryono, 2010)	Studi evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP pada program pemberdayaan masyarakat
5	Penelitian (Proyek ILO): “ <i>Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java</i> ” (Matthieu Cognac dan Bria Wei, 2009)	Fokus Kajian tentang pemberdayaan ekonomi lokal
6	Jurnal: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang (Iqbal Tajuddin dkk., 2018)	Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan sesuai dengan usulan program desa mitra
7	Jurnal: Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi	Karakteristik dan model pemberdayaan desa mitra yang dilaksanakan oleh PTKI secara umum memiliki kesamaan

Sumber: Eko Sutoro, 2014 (diolah)

UU desa telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan, dengan menjadi subyek pembangunan, desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahteraan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga

negaranya sendiri maupun negara lain.⁷³ Paradigma baru tentang desa lebih menekankan pada model “Desa Membangun” daripada “Membangun Perdesaan”, desa membangun menempatkan desa sebagai subyek, sementara paradigma lama menempatkan desa sebagai obyek pembangunan, dan menjadi domain pemerintah. Perbedaan kedua model tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :⁷⁴

Tabel 2.3. Perbedaan Model Membangun Desa dan Desa Membangun

No	Penelitian	Relevansi
1	Disertasi: Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin (Sungkowo Edy Mulyono, 2011)	Pemberdayaan ekonomi lokal yang akan dievaluasi menitikberatkan pada pendidikan non formal seperti tema pelatihan-pelatihan pada masyarakat des binaan UIN Raden Intan
2	Disertasi: Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup (Nugroho Pratomo, 2015)	Basis pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia sebagai usulan pengembangan model pemberdayaan ekonomi lokal
3	Disertasi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru (Yusuf Gunawan, 2017)	Penerapan konsep desa membangun melalui partisipasi masyarakat dalam program desa binaan/mitra
4	Disertasi: Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor (Haryono, 2010)	Studi evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP pada program pemberdayaan masyarakat
5	Penelitian (Proyek ILO): “ <i>Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java</i> ” (Matthieu Cognac dan Bria Wei, 2009)	Fokus Kajian tentang pemberdayaan ekonomi lokal
6	Jurnal: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang (Iqbal Tajuddin dkk., 2018)	Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan sesuai dengan usulan program desa mitr
7	Jurnal: Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi	Karakteristik dan model pemberdayaan desa mitra yang dilaksanakan oleh PTKI secara umum memiliki kesamaan

Sumber: Eko Sutoro, 2014 (diolah)

⁷³ Kurniawan, Boni., *Desa Mandiri Desa Membangun*, Buku 5, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015), h.20

⁷⁴ Eko Sutoro, Op.cit, h.39

Membangun desa memiliki tujuan terwujudnya desa mandiri yaitu sebuah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Beberapa strategi dapat digunakan dalam membangun kemandirian desa, antara lain :⁷⁵

- a) Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif masyarakat.
- b) Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat tentu membutuhkan sistem perencanaan yang terarah di ditopang partisipasi warga yang baik.
- d) Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.

Melihat definisi membangun desa pada tabel di atas, terlihat bahwa konsep desa membangun sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi lokal dimana sama-sama mendorong terjadinya kerjasama kolektif antara sektor publik pemerintah, sektor publik non pemerintah, sektor swasta (dunia usaha) dan

⁷⁵ Kurniawan, Boni., Op.cit, h.

masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan. UU desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk memberdayakan masyarakatnya, maka untuk melakukan upaya tersebut desa dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain.

Desa dalam kerangka kerjasama pemberdayaan ekonomi lokal, dapat memanfaatkan program-program Desa Binaan/Desa Mitra yang banyak dilaksanakan oleh sektor swasta (dunia usaha) dan sektor publik non pemerintah (misalnya Perguruan Tinggi). Program Desa Binaan yang dilaksanakan oleh sektor swasta merupakan bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap masyarakat sekitar, tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang dan bersifat sebagai tanggungjawab yang melekat untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial tentu dapat dijadikan peluang bagi desa dalam memberdayakan masyarakatnya, beberapa contoh program desa binaan perusahaan yang berhasil mengangkat kualitas hidup masyarakat, antara lain : (a) Program Pertamina Village, yaitu desa binaan Pertamina merupakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan dengan memanfaatkan potensi lokal dan bertujuan untuk kemandirian masyarakat⁷⁶, (b) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT.

⁷⁶ <https://pertamina.com/id/pertamina-village>, diakses tanggal 3 Desember 2020

Aneka Tambang, Program Kemitraan dijalankan berbasis sumber daya lokal untuk peningkatan ekonomi lokal melalui pemberian pinjaman dana bergulir untuk UMK (usaha mikro dan kecil). Pemberian dana bergulir ini juga diikuti dengan pelatihan dan pembinaan, termasuk pelatihan manajemen usaha dan promosi⁷⁷, (c) Program Kampung Berseri Astra Menuju Desa Sejahtera. Program CSR PT. Astra ini fokus pada peningkatan ekonomi berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa melalui pengembangan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Pedesaan) sesuai daerahnya masing-masing.⁷⁸

Sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan perekonomian desa yang berfokus menangani infrastruktur, maka Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. Perkembangan sosial ekonomi desa akan lebih cepat dengan dibangunnya infrastruktur dan terbukanya akses. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan desa di segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut.⁷⁹ Program Desa Binaan/Desa Mitra sebagai salahsatu upaya dalam pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi, Desa Mitra pada

⁷⁷ <https://www.antam.com/en/csr-activities>, diakses tanggal 3 Desember 2020

⁷⁸ <https://www.astra.co.id/CSR>, diakses tanggal 3 Desember 2020

⁷⁹ Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, *Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, edisi xii, (Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 66

Perguruan Tinggi menjadi salahsatu program Pengabdian kepada Masyarakat memiliki beberapa tujuan, antara lain :⁸⁰

- a. mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;
- b. memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistik berbasis riset multidisiplin;
- c. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;
- d. membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;
- e. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- f. mempercepat pembangunan desa pada berbagai bidang secara berkelanjutan;
- g. memperkuat sinergi perguruan tinggi (PT) dengan pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan desa; dan
- h. membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park perguruan tinggi.

Pelaksanaan Desa Mitra memakai konsep kemitraan, kemitraan lebih dari sekedar kerjasama, kemitraan (*partnership*) dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam suatu usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.⁸¹ Berdasarkan konsep kemitraan tersebut, Perguruan Tinggi dan Desa Mitra memiliki kedudukan yang sama, tidak ada pihak yang lebih mendominasi atau merasa lebih baik dibandingkan pihak lainnya, oleh karena itu keberhasilan kemitraan sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang dianut bersama sebagai berikut :⁸²

⁸⁰ Ibid, h.67

⁸¹ Raharjo Weda, Tri., *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi*, (Surabaya : Jakad Publishing, 2018), h.9

⁸² Ibid, h.12

- a. Prinsip Kesetaraan (equity), individu, organisasi atau intitusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan desa mitra, melalui prinsip kesetaraan, desa bukan menjadi subordinasi perguruan tinggi
- b. Prinsip Keterbukaan, keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumberdaya yang dimiliki harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan harus ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling terbuka ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu antar mitra dan saling berbagi sumber daya. Melalui prinsip keterbukaan, potensi konflik antar pihak yang dapat merusak jalinan kemitraan dapat dimimalisir.
- c. Prinsip Azas Manfaat Bersama (mutual benefit), individu, organisasi atau intitusi yang telah bersedia menjalin kemitraan memperoleh manfaat sesuai dengan kontribusi masing-masing.

Prinsip kemitraan harus dipatuhi bersama karena masih banyak yang menganggap bahwa dalam kemitraan perguruan tinggi dan desa/masyarakat, peran perguruan tinggi adalah untuk mengajar, peran mahasiswa adalah untuk belajar, dan peran mitra adalah menyediakan laboratorium atau serangkaian kebutuhan untuk ditangani atau dijelajahi. Seringkali akademisi datang ke komunitas dari apa yang tampak seperti konteks istimewa dan kaya, dan hubungan kekuasaan di dalam kemitraan tidak sama. Demografi, ras, budaya, dan bahasa dalam perspektif kampus

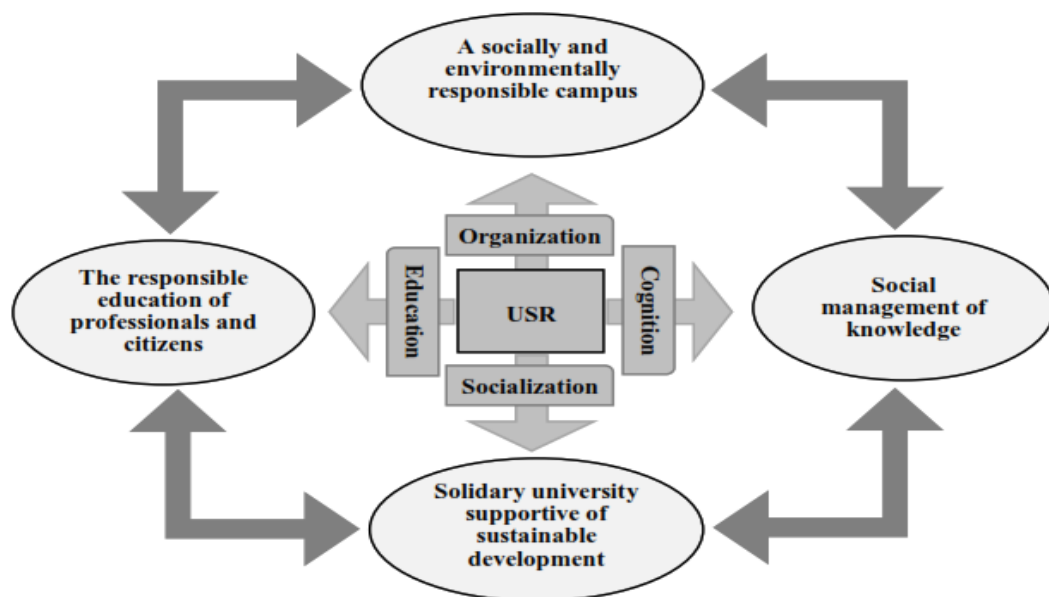
dan masyarakat sangat berbeda, ini merupakan tantangan untuk memastikan pertukaran bebas di seluruh kemitraan dan untuk memastikan saling menguntungkan bagi semua pihak.

Program Desa Binaan/Desa Mitra berdasarkan penjelasan di atas, bagi Perguruan Tinggi dapat dipandang sebagai tanggungjawab sosial (*University Social Responsibility/USR*), berbeda dengan konsep CSR yang hadir sebagai bentuk pembagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat terdampak aktifitas produksi perusahaan, dan implemenasinya kebanyakan dalam bentuk pemberian dana bergulir atau pinjaman lunak. USR pada perguruan tinggi lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara implementasi, USR merupakan respon perguruan tinggi terhadap permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat, lebih fokus pada pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Reiser (2008) dalam Carlos Wing-Hung Lo (tt) mendefinisikan USR sebagai kebijakan kualitas etis dari kinerja civitas akademika universitas (mahasiswa, fakultas, dan tenaga administrasi karyawan) melalui manajemen yang bertanggung jawab atas pendidikan, kognitif, tenaga kerja dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh Universitas, dalam dialog interaktif dengan masyarakat untuk mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan.⁸³ Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh universitas, Vallaey (2014) dalam Bokhari (2017) membedakan empat jenis: dampak organisasi yang mempengaruhi lingkungan universitas dan komunitas termasuk mahasiswa, staf

⁸³ Lo Wing-Hung, Carlos., et.all, *University Social Responsibility : Conceptualization and An Assessment Framework*, (New York: Springer, tt), h.40

dan akademisi; dampak pendidikan yang berkaitan dengan mendidik orang dan membentuk etika dan nilai; dampak kognitif yang berkaitan dengan membangun dan menghasilkan pengetahuan, mengkonsolidasikan hubungan antara konteks teknologi dan sosial ilmu pengetahuan dan masyarakat; dan dampak sosial yang berkaitan dengan mempengaruhi masyarakat melalui pembinaan kemajuan, membangun modal sosial, dan mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Keempat dampak ini memungkinkan Vallaeys untuk menguraikan empat bidang manajemen universitas yang bertanggung jawab secara sosial, seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini :⁸⁴

Gambar 2.1. Universities Areas of Social Responsibility



⁸⁴ Bokhari A.H., Abl., *Universities Social Responsibility and Sustainable Development: Conceptual Framework*, SSRG International Journal of Economics and Management Studies, vol.4, issue 12, December 2017

Konsep USR muncul karena adanya kesadaran bahwa eksistensi perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat (*community engagement*), oleh karena itu perguruan tinggi tidak hanya berkewajiban memproduksi sarjana semata tetapi harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat dalam bentuk pelayanan masyarakat (*community service*). Dalam konteks manajemen strategi, USR harus dijadikan sebagai standar nilai yang dianut seluruh civitas akademika, dan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun visi dan misi serta diterapkan dalam seluruh proses bisnis perguruan tinggi (Tridharma Perguruan Tinggi).

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui program Desa Mitra disamping membutuhkan peran sektor swasta (dunia usaha) dan peran perguruan tinggi (akademisi) tentu tidak kalah penting adalah peran pemerintah. Peran Pemerintah adalah sebuah keniscayaan dalam pemberdayaan ekonomi, pemerintah memiliki peran membuat kebijakan-kebijakan yang pro desa/masyarakat, memberikan stimulus finansial, serta menyediakan infrastruktur (jalan, listrik, air dan telekomunikasi). Pemerintah, dunia usaha dan universitas Masing-masing memiliki peran yang berbeda tetapi memiliki tanggungjawab yang sama yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

5. Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

Perguruan Tinggi memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Indonesia dalam jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya

manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan penyediaan sarana pendidikan yang berkualitas, peningkatan penelitian dan publikasi hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Pendidikan pada Pendidikan tinggi berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi mempunyai karakteristik khusus, jika pada pendidikan dasar dan menengah peserta didik (siswa) cenderung pasif dalam proses pembelajaran maka peserta didik pada pendidikan tinggi (mahasiswa) lebih aktif, keterlibatan pendidik pada pendidikan tinggi (dosen) lebih diarahkan hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar dan memberikan pengalaman belajar. Mahasiswa didorong untuk lebih kreatif mengembangkan kemampuan belajarnya terlebih di era teknologi informasi saat ini, dimana bahan dan sumber belajar dengan sangat mudah dapat diakses. Pendidikan pada perguruan tinggi juga dapat dipandang sebagai proses pembentukan manusia yang unggul, yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*), pendidikan tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mempunyai tujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.⁸⁵

⁸⁵ Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dihadapkan pada tantangan yang semakin meningkat terutama dengan adanya globalisasi di seluruh bidang kehidupan. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa, kelangsungan hidup perguruan tinggi sangat tergantung dengan tingkat kepercayaan masyarakat, untuk itu perguruan tinggi perlu memperhatikan setidaknya tiga faktor kunci yaitu : penampilan, pelayanan dan produk. Penampilan lembaga dapat dilihat dari ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang nyaman dan aman dan penggunaan yang bertanggungjawab dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelayanan terhadap masyarakat ditunjukkan dengan adanya seperangkat prosedur dan kebijakan serta indikator kinerja yang jelas dan lengkap demi terjaminnya pelayanan prima, sedangkan produk, dalam hal ini alumni yang dihasilkan, mempunyai kompetensi tinggi dan mampu bersaing (*marketable*) dalam dunia kerja dan dapat diterima di tengah masyarakat.

Perguruan tinggi dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan tersebut terjalin dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam bidang penelitian tema-tema penelitian berbasis *action research* telah banyak memberikan manfaat, baik yang bersifat praktis maupun teoritis, terhadap persoalan-persoalan hidup yang terjadi di tengah masyarakat. Program pengabdian dijalankan dengan berbagai macam model dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Agama No.55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan pasal 1 ayat 3, yang dimaksud

dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam peraturan yang sama pasal 13, pengabdian kepada masyarakat memiliki tujuan : (a) memberdayakan masyarakat, (b) mengembangkan potensi lingkungan, (c) menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, dan (e) mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian civitas akademika.

Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4834 tahun 2015, tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, menggunakan paradigma baru yaitu “Kemitraan Universitas-Masyarakat” (KUM). Kemitraan yang dikembangkan antara perguruan tinggi dengan masyarakat menjadi hal yang sangat penting, untuk menjaga hubungan agar perguruan tinggi tidak tercerabut dari akar masyarakat. Melalui kemitraan masing-masing pihak memiliki tanggungjawab dan kontribusi yang sama dalam upaya pembangunan bangsa, kemitraan juga mengandung prinsip kesetaraan, perguruan tinggi menyumbangkan aset dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat menyumbangkan aset dalam bentuk sumber daya alam dan modal sosial. Kedua komponen aset tersebut dapat diberdayakan secara bersama, sehingga model pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset (*asset based community development*) dan pengembangan yang didorong oleh

masyarakat, harus diperkuat pada program pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dan masyarakat dalam paradigma KUM, dituntut kreatif dalam merencanakan kegiatan yang menumbuhkan potensi warga tanpa harus menggurui mereka. Oleh karena itu, model-model pembelajaran tidak melulu dilakukan di dalam kelas, model pembelajaran berbasis masyarakat seperti *service learning* dan penelitian berbasis masyarakat (*community based research*) dengan metode PAR (*Participatory Action Research*) dapat digunakan. Apabila dilaksanakan secara sistematis, terencana dan terprogram dengan baik, pendekatan kemitraan ini akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat. Keberhasilan kemitraan Universitas dan Masyarakat dipengaruhi sejumlah faktor, yang paling penting adalah menjalin hubungan yang produktif dalam masyarakat, karena kemitraan seringkali bertumpu pada kekuatan modal sosial antara perguruan tinggi dengan masyarakat sekitar. Tanpa dasar kepercayaan ini, hubungan kedua pihak tidak akan bertahan lama atau sehat. Selain itu, kemitraan, meskipun didorong oleh hubungan, sepertinya tidak akan berhasil maju tanpa mendefinisikan tujuan, kesepakatan, dan tujuan yang jelas. Keberhasilan kemitraan antara masyarakat dan perguruan tinggi bertumpu pada kemampuan mitra untuk mengembangkan visi bersama.⁸⁶

Penguatan distingsi perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis masyarakat perlu ditunjukkan, karena akar dari perguruan tinggi keagamaan Islam adalah masyarakat. PTKI muncul dan tumbuh karena masyarakat, dikelola oleh

⁸⁶ Anglin V., Roland, *Promoting Sustainable Local And Community Economic Development*, (Boca Raton : CRC Press, 2011), h.185

masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah, serta keberadaannya adalah untuk kemaslahatan masyarakat lebih luas. Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat dengan paradigma kemitraan didasarkan pada asas:

1. Partisipasi

Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.

2. Pemberdayaan

Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

3. Inklusifitas

Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatananyang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan fisik/mental.

4. Kesenjangan dan keadilan gender

Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol dan akses terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan

melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.

5. Ramah Lingkungan.

Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tatakelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

6. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tatakelola yang baik dan demokratis.

7. Transparansi

Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.

8. Kemitraan

Menjalin kerjasama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.

9. Keberlanjutan

Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak manapun.

10. Kesukarelaan

Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. Manfaat

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan, sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka.

12. Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi sosial

Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi perguruan tinggi untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. Pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. Pendampingan masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.

3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. Pemberdayaan ekonomi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. Layanan masyarakat, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. Ujicoba, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (action research) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

Pengabdian kepada masyarakat sebagai sebuah proses dalam pelaksanaannya harus memperhatikan tahapan-tahapan yang sistematis, proses tersebut dimulai dari tahap perencanaan, dalam paradigma KUM perencanaan program pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan penelitian pendahuluan atau memanfaatkan hasil penelitian yang telah ada atau muncul dari proses

pembelajaran yang telah ada, kemudian Pusat Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan para pemangku kepentingan dan semua mitra menyusun desain program pengabdian kepada masyarakat, termasuk menentukan masyarakat sasaran pengabdian. Mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah masyarakat kampus dan luar kampus yang meliputi: (a) Perorangan atau individu, (b) Komunitas atau kelompok, (c) Lembaga atau organisasi, dan (d) dunia usaha atau industri, sedangkan masyarakat sasaran adalah masyarakat perkotaan dan pedesaan, terutama masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat difabel, kelompok minoritas, serta kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya.

PPM sebagai pengelola program PkM secara sistematis melaksanakan perencanaan program melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pusat Pengabdian PM membentuk tim untuk melakukan analisis aset mitra pengabdian kepada masyarakat, sesuai potensi, peluang, dan kebutuhan nyata masyarakat mitra pengabdian.
- b) Tim PPM bersama masyarakat mitra pengabdian melakukan pemetaan geografis, sosial, keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, untuk menyusun rencana tindakan berdasarkan aset, peluang dan minat.
- c) PPM bersama masyarakat mitra membuat usulan program sesuai prioritas lengkap dengan rencana program dan finansialnya (kerangka acuan) kepada Kepala LPPM.
- d) Ketua LPPM membahas usulan program bersama Ketua PPM, Puslit, PSG dan Kepala Biro atau Bagian Perencanaan.

- e) Ketua LPPM mengusulkan program pengabdian yang telah dibahas tersebut kepada pimpinan universitas/ institut/ sekolah tinggi untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, proses menjadi DIPA dan RKA-KL (RBA untuk PTKIN yang sudah memperoleh status BLU) termasuk kegiatan yang dibiayai dari luar, yang sumber dananya dari hibah, kontrak, dan kerjasama.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan program PkM adalah Monitoring dan Evaluasi, kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Monitoring atau pemantauan dilaksanakan dari proses perencanaan sampai implementasi di lapangan, hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua tahapan dilalui sesuai dengan pedoman, melalui monitoring apabila terjadi kesalahan dapat segera terdeteksi sehingga memungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Evaluasi Program

Evaluasi pada suatu kegiatan seringkali dimaknai hanya sebagai penilaian, dan menjadi acuan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dianggap selesai ketika evaluasi sudah dilaksanakan. Evaluasi menurut *The Join Committe* (1994) adalah :

“*Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of an object*”⁸⁷, evaluasi adalah penyelidikan secara sistematis terhadap nilai atau manfaat sebuah obyek, Evaluasi Menurut Troachim (1998) dalam Mertens dan Wilson (2019) adalah profesi yang menggunakan metodologi formal untuk memberikan bukti empiris yang berguna tentang entitas publik (seperti program, produk, kinerja) dalam konteks pengambilan keputusan yang secara inheren bersifat politis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan yang sering berkonflik, di mana sumber daya jarang mencukupi, dan di mana tekanan waktu sangat penting.⁸⁸

Menurut Troachim Evaluasi adalah Troachim menekankan dalam definisinya bahwa evaluasi digunakan sebagai alat politik/kebijakan untuk pengambilan keputusan dimana konflik kepentingan sering terjadi diantara para pemangku kepentingan karena dihadapkan pada sumber daya yang terbatas sementara target waktu sangat ketat, misalnya evaluasi terhadap kinerja pegawai, hasil evaluasi kinerja dijadikan dasar politik/kebijakan pengambil keputusan dalam menentukan *reward* apabila target kinerja tercapai atau *punishment* jika target kinerja tidak tercapai.

Evaluasi dalam manajemen adalah salah satu fungsi yang harus dijalankan, setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, fungsi-fungsi dalam manajemen tersebut secara sistematis membentuk sebuah siklus yang berulang. Secara umum Evaluasi menurut Fournier (2005) dalam Mertens dan Wilson (2019) adalah proses penyelidikan terapan untuk mengumpulkan dan mensintesis bukti

⁸⁷ Stufflebeam L., Daniel and Coryn L.S., Chris, *Evaluation Theory, Models, And Applications*, second edition, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2014), h.8

⁸⁸Mertens M., Donna and Wilson T., Amy, *Program Evaluation Theory and Practice*, second edition, (New York: The Guilford Press, 2019), h.5

yang berujung pada kesimpulan tentang keadaan, nilai, prestasi, signifikansi, atau kualitas suatu barang. program, produk, orang, kebijakan, proposal, atau rencana. Kesimpulan yang dibuat dalam evaluasi mencakup aspek empiris (bahwa ada sesuatu yang terjadi) dan aspek normatif (penilaian tentang nilai sesuatu). Ini adalah fitur nilai yang membedakan evaluasi dari yang lain jenis penyelidikan, seperti penelitian sains dasar, epidemiologi klinis, jurnalisme investigasi, atau jajak pendapat publik.⁸⁹

Fournier menekankan pada hasil kesimpulan yang mencakup aspek empiris maupun aspek normatif, untuk itu dalam evaluasi membutuhkan penetapan ukuran parameter, indikator dan standar yang jelas. Pada aspek empiris evaluasi membutuhkan parameter dan indikator, parameter digunakan untuk mengukur keberhasilan, sementara indikator adalah alat ukur dari parameter tersebut. Pada aspek normatif evaluasi memerlukan standar nilai untuk menilai tentang baik/buruk, benar/salah, dan sebagainya.

Evaluasi adalah proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*appraisal*) pelaksanaan sesuatu, mengukur berarti membandingkan hasil pelaksanaan dengan parameter dan indikator yang sudah ditetapkan, sedangkan menilai adalah memberikan hasil dengan kriteria benar atau salah dan baik atau buruk. Evaluasi dapat dilakukan setelah pelaksanaan untuk mengukur dampak/hasil, maupun saat pelaksanaan, untuk deteksi dini jika ada kesalahan-kesalahan prosedural. Evaluasi adalah proses sistematis di mana data terkait dikumpulkan dan diubah menjadi informasi untuk mengukur efek pelatihan, membantu pengambilan keputusan

⁸⁹ *ibid*, h.6

mendokumentasikan hasil yang akan digunakan dalam perbaikan program, dan menyediakan metode untuk menentukan kualitas pelatihan.⁹⁰ Proses yang sistematis dalam evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang berurutan, logis dan menggunakan metode ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk diolah menjadi informasi yang berguna untuk : (a) mengukur dampak pelatihan, (b) dokumentasi hasil untuk pengambilan keputusan dalam perbaikan program, dan (c) menyediakan metode untuk mengukur kualitas program. Dalam pengumpulan dan pengolahan data menjadi sekumpulan informasi dapat menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif umumnya lebih fleksibel dalam pengumpulan datanya, metode yang sering digunakan adalah angket, observasi, wawancara, dokumentasi, rekaman audio dan video, dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif pengumpulan datanya menggunakan metode statistik seperti kuesioner dan uji statistik atas variabel-variabel yang akan dievaluasi.

Program kegiatan adalah serangkaian rencana yang akan dijalankan dalam sebuah kegiatan, program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program dalam hal ini berupa aktivitas atau rangkaian aktivitas yang akan direncanakan.⁹¹Evaluasi terhadap program kegiatan wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa program telah dilaksanakan sesuai rencana dan dapat

⁹⁰ Basarab, David J., *The Training Evaluation Process : a Practical Approach to Evaluating Corporate Training Programs (Evaluation In Educational and Human Service)*, (New York: Springer, 1992), h.2

⁹¹ Ananda, Rusydi. Dan Rafida, Tien., *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h.5

diselesaikan secara tepat waktu. Evaluasi program dapat dipandang sebagai sebuah metode penelitian, “*Program evaluation is the use of social science research methods by evaluators, administrators, or practitioners to assess the planning, implementation, or outcome of social programs in a political environment*”.⁹² Evaluasi program dalam definisi tersebut mengandung beberapa hal penting, yaitu : (a) evaluasi program digunakan sebagai metode riset ilmu sosial, (b) pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi program, (c) hal-hal yang dinilai dalam evaluasi program, dan (d) evaluasi program sebagai politik/kebijakan.

Evaluasi Program sebagaimana beberapa definisi yang telah dikemukakan mengandung beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain :⁹³

- a. Komprehensif, evaluasi program harus komprehensif menyangkut seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan program, meliputi manusia, material, maupun operasionalnya.
- b. Komparatif, untuk mengukur keberhasilan program, evaluasi harus berdasarkan parameter, indikator dan standar yang jelas.
- c. Kontinyu, evaluasi merupakan proses yang sistematis dan kontinyu
- d. Obyektif, untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya, evaluasi harus dapat dilaksanakan secara obyektif berdasarkan metode ilmiah.
- e. Kriteria Valid, validitas bukti-bukti harus tepat sesuai dengan tujuan dilakukan evaluasi

⁹² Smith J., Michael, *Program Evaluation in Human Services*, (New York : Springer, 1990), h.20

⁹³ Slameto, *Model, Program, Evaluasi Beserta Tren Supervisi Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2020), h.174-176

- f. Fungsional, hasil evaluasi berfungsi tidak hanya sebagai laporan hasil tapi harus dapat menghasilkan rekomendasi untuk program selanjutnya.
- g. Diagnostik, evaluasi harus menghasilkan kemampuan diagnostik untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan program

Evaluasi program secara umum dibedakan menjadi tiga jenis evaluasi, yaitu: evaluasi summatif, evaluasi formatif, dan evaluasi summatif-formatif. Evaluasi (*outcome/ summative*) berhubungan dengan efektivitas atau dampak keseluruhan dari suatu program yang diimplementasikan dalam suatu komunitas. Evaluasi sumatif juga dapat dijelaskan sebagai evaluasi setelah suatu skema (rancangan) program/ proyek pembangunan selesai dilaksanakan. Secara umum, tujuannya adalah untuk menilai manfaat program/proyek serta rancangan dan pengelolaannya. Temuan dari kegiatan evaluasi sumatif dapat digunakan sebagai bahan pelajaran bagi implementasi dari kegiatan pembangunan lain yang memiliki karakteristik yang sama. Namun, secara umum, fokus utama dari evaluasi sumatif adalah pada penilaian akuntabilitas dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas suatu program/ proyek dan/atau lembaga-lembaga donor.⁹⁴

Evaluasi sumatif lebih pada efektivitas atau dampak menyeluruh dari suatu program, sedangkan evaluasi (*process/Formative*) berhubungan dengan pemahaman atas cara-cara atau proses dari pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan dalam suatu komunitas. Evaluasi Formatif mengacu pada peningkatan pencapaian dari suatu program/proyek yang dievaluasi dengan

⁹⁴ Sardo, Sulastri, dkk., *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial: Partisipasi Multipihak Dalam Evaluasi Program*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.3

mengambil pelajaran dari pengalaman yang diperoleh (*lessons learned*) selama suatu program/proyek diimplementasikan dalam suatu komunitas. Bagi sebagian besar program, yang bertujuan membawa perubahan, penjelasan mengenai rancangan dan pelaksanaan suatu program memegang peranan cukup penting, karena program-program tersebut cenderung memiliki kerangka kerja yang khas dan sampai tingkat tertentu memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya.⁹⁵

Evaluasi Summatif-Formatif merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil maupun proses, evaluasi jenis ini yang cukup luas digunakan untuk mengevaluasi program adalah model evaluasi CIPP, "*The CIPP Model (Context, Input, Process, and Product) can be used for both type of evaluation, summative and formative*".⁹⁶ Model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, mengevaluasi tidak hanya hasil, tetapi meliputi tujuan, rencana, sumber daya, dan implementasi. Orientasinya proaktif dalam memandu kebutuhan evaluasi, penetapan tujuan, perencanaan, implementasi, dan *quality assurance*, dengan penekanan pada kesinambungan perbaikan. Evaluasi Ini juga retrospektif dalam melihat ke belakang pada menyimpulkan, dan menilai akuntabilitas dan nilai program yang telah diselesaikan.⁹⁷

B. Deskripsi Program Desa Binaan

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) merupakan unit kerja yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

⁹⁵ Ibid, h.3

⁹⁶ Aziz, Shamsa, et.all., *Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study*, Journal of Education and Educational Development, vol.5, No.1 (June 2018), h.192

⁹⁷ Stufflebeam L., Daniel and Zhang, Guili, *The CIPP Evaluation Model : How To Evaluate For Improvement and Accountability*, (New York : The Guilford Press, 2017), h.6

UIN Raden Intan Lampung. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) merupakan unit kerja yang mengelola tentang pengabdian mahasiswa dan dosen kepada masyarakat. Pengabdian Masyarakat oleh mahasiswa dan Dosen memiliki beragam bentuk, jenis, pendekatan, dan mekanisme aksi. Di Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) UIN Raden Intan Lampung, pengabdian masyarakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan *Community Engagement* (CE) antara Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) UIN Raden Intan Lampung dengan masyarakat provinsi Lampung. Bentuk-bentuk *Community Engagement* (CE) yang ada dalam tupoksi P2M yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN dan segala derivasinya adalah modus CE yang mana aktor utamanya adalah mahasiswa. Di mana dalam praktiknya, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan KKN harus melakukan kerja nyata di lapangan dengan desain tertentu dan target tertentu selama 40 hari. Jika KKN dan variannya menjadikan mahasiswa sebagai aktor utama, pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi itu juga harus dilakukan oleh para dosen. Pengabdian masyarakat oleh dosen ini memiliki sistem, mekanisme, dan proses pengelolaan yang berbeda dengan pengabdian mahasiswa.

Model pengabdian yang ditawarkan oleh P2M UIN Raden Intan Lampung, yaitu: pengabdian murni yang langsung dilaksanakan oleh dosen, pengabdian berbasis riset yang dilaksanakan oleh dosen, dan pengabdian yang dilaksanakan oleh P2M dengan mengikutsertakan dosen di dalamnya. Pengabdian yang dilaksanakan oleh P2M diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan istilah Desa Binaan (Desbin). Program Desa Binaan UIN Raden Intan

meliputi kegiatan pembinaan dan pembangunan fisik sarana prasarana, pembinaan mental spiritual, dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh P2M UIN Raden Intan Lampung merupakan proses dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat lebih diarahkan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) kepada masyarakat.

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Desa Binaan dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada kemandirian masyarakat dengan pola intervensi pada beberapa bidang utama yaitu pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan perempuan (ibu-ibu rumah tangga). Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat luas dapat berupa kelompok masyarakat maupun komunitas yang berada di pedesaan. Program tersebut dilaksanakan dengan melalui peningkatan kapasitas, pengembangan produk unggulan dan inovasi dalam pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan pemberdayaan melalui pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menggerakkan masyarakat agar lebih terbuka untuk berkarya dan mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memberi nilai tambah secara ekonomis, baik pada barang baru maupun pada barang bekas atau sudah tidak digunakan sehingga memberi nilai guna dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Artinya, dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan

mampu memberi angin segar bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitasnya menghasilkan barang atau jasa yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga mampu menjadi sumber penghasilan dan menopang ekonomi keluarga.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Desa Binaan oleh P2M UIN Raden Intan Lampung merupakan pemberdayaan berbasis sumber daya lokal dengan melihat potensi-potensi alam pada lingkungan masyarakat desa yang bisa difungsikan untuk menambah nilai ekonomis bagi pendapatan masyarakat desa tersebut. Program Desa Binaan memiliki beberapa tujuan, antara lain:⁹⁸

- a) Terjalannya komunikasi dan hubungan baik antara masyarakat setempat dengan UIN Raden Intan, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sehingga antara kedua belah pihak bisa saling tukar informasi khususnya mengenai perkembangan masyarakat.
- b) Sebagai pemicu dan motivator masyarakat desa untuk dapat melaksanakan pembangunan desa dengan berlandaskan pada kemampuan dan sumber daya yang ada di desa yang bersangkutan.
- c) Terbangunnya sebagian SDM masyarakat desa, sehingga pada waktunya dapat menjadi pelopor pembangunan desanya sendiri.
- d) Terciptanya hubungan yang harmonis antara masyarakat desa dengan civitas akademika.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Desa Binaan telah dilaksanakan dengan model pelatihan usaha ekonomi kreatif dan model pembinaan

⁹⁸ Team Desa Binaan, *Laporan Desa Binaan I*, (Bandar Lampung: LPPM UIN Raden Intan, 2017), h.2

home industry. Model pelatihan usaha kreatif memiliki tema pemberdayaan wanita dalam peningkatan ekonomi keluarga, fokus pada peran wanita dipilih karena seperti diketahui seiring dengan kemajuan zaman, wanita saat ini memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi keluarga. Pemberdayaan wanita memiliki tujuan untuk membangun kesadaran wanita tentang kesetaraan gender, yang merupakan bagian dari prinsip pemberdayaan, agar wanita mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian. Pelatihan-pelatihan usaha ekonomi kreatif yang sudah dilaksanakan antara lain: membuat anyaman tempat buah menggunakan lidi kelapa, memproduksi dodol berbahan dasar Pepaya dan Kulit Pisang, membuat hiasan bingkai dari botol bekas air mineral, dan sebagainya.

Home industry atau industri rumah tangga adalah industri skala kecil berbasis rumah tangga dengan ciri utama pengelolaan yang masih tradisional dan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia, industri rumah tangga memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ketahanan ekonomi masyarakat, oleh karena itu model pembinaan *home industry* pada program Desa Binaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pengembangan usaha masyarakat tersebut didorong untuk memanfaatkan secara maksimal sumber daya lokal yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembinaan *home industry* telah dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan pengolahan makanan dan pembuatan kerajinan tangan.

C. Model Evaluasi

Pemberdayaan ekonomi sebagai sebuah program *community service* membutuhkan evaluasi yang lebih spesifik terutama terkait dengan prinsip-prinsip evaluasi yang digunakan. Pendekatan evaluasi dalam program pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan program, jika pada evaluasi tradisional lebih kepada pengukuran dan penilaian keberhasilan program, maka evaluasi pada program pemberdayaan melihat program secara keseluruhan, dan memandang evaluasi bagian dari perencanaan program itu sendiri.⁹⁹ Dalam evaluasi program pemberdayaan menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. *Improvement*, evaluasi program pemberdayaan ditujukan untuk perbaikan agar program-program selanjutnya dapat berjalan lebih efektif demi tercapainya tujuan program.
- b. *Community Ownership*, program pemberdayaan sepenuhnya berorientasi kepada kepemilikan masyarakat, maka evaluasi yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan dimana masyarakat itu berada.
- c. *Inclusion*, dalam program pemberdayaan melibatkan masyarakat yang setiap individunya memiliki perbedaan kepentingan, oleh karena itu evaluasi diarahkan untuk mencari, menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut.

⁹⁹Wandersmen, Abraham., et.all., *The Principles of Empowerment Evaluation (Empowerment Evaluation Principles in Practice)*, edited by David M Fetterman and Abraham Wandersmen, (New York : The Guilford Press, 2005), h.28

¹⁰⁰ Ibid, h.29

- d. *Democratic Participation*, secara demokratis, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam evaluasi sehingga hasil evaluasi memenuhi kriteria reliabel untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- e. *Social Justice*, keadilan sosial dalam evaluasi memiliki makna bahwa masyarakat sasaran evaluasi harus memperhatikan hak-hak masyarakat.
- f. *Community Knowledge*, evaluasi harus menjadi pengetahuan masyarakat, arti pentingnya terhadap keberlangsungan program, dengan demikian akan muncul kesadaran bersama dalam mendukung keberhasilan program.
- g. *Evidence-based strategies*, strategi evaluasi yang dilaksanakan menggunakan dasar bukti, sehingga secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
- h. *Capacity Building*, pembangunan kapasitas menjadi prinsip evaluasi pemberdayaan agar masyarakat diharapkan dapat melakukan *self-evaluation*.
- i. *Organizational learning*, evaluasi dapat dijadikan media pembelajaran mengingat perannya yang strategis dalam manajemen.
- j. *Accountability*, evaluasi program pemberdayaan harus dapat menjadi instrumen pertanggungjawaban atas keberhasilan program itu sendiri.

Dalam Evaluasi program pemberdayaan, evaluator ditempatkan bukan sebagai ahli tetapi lebih pada posisi “*critical friend*”¹⁰¹, evaluator sebagai teman yang kritis ini perannya lebih mirip sebagai pembina atau penasihat ketimbang

¹⁰¹ Mertens M., Donna and Wilson T., Amy , Loc.cit, h.120

penilai. “Teman kritis” membantu para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi mereka untuk perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan data sebagai dasar keputusan mereka. Ini mengakibatkan para pemangku kepentingan memberdayakan diri mereka sendiri untuk membuat perubahan guna meningkatkan produktivitas mereka.

Berdasarkan model-model evaluasi yang sudah dijelaskan di atas, menurut penulis model yang paling tepat untuk melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan ekonomi lokal desa binaan/desa mitra adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Proses and Product*), yang dikembangkan oleh Stufflebeam, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Model CIPP lebih komprehensif karena melihat program lebih menyeluruh dari perencanaan sampai dengan dampak yang dihasilkan.
- b. Memberikan hasil yang lebih terinci sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan program.
- c. Literatur sangat memadai dan komprehensif, bahkan secara khusus Stufflebeam memberikan tawaran bagaimana menggunakan model Evaluasi CIPP dalam penyelesaian disertasi program doktoral.

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process and Product) dikembangkan oleh Stufflebeam, adalah :¹⁰²

“The CIPP Model is a comprehensive framework for guiding formative and summative evaluations of projects, programs, personnel, products, institutions, and systems. The model is configured for use in internal evaluations conducted

¹⁰² Stufflebeam L., Daniel, *The CIPP Model For Evaluation*, (Oregon: Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN), 2003), h.2

by an organization's evaluators, self-evaluations conducted by project teams or individual service providers, and contracted or mandated external evaluations."

Model CIPP merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melakukan evaluasi yang bersifat formatif maupun summatif. Dengan kata lain model CIPP merupakan evaluasi terhadap dampak program (summatif) sekaligus evaluasi terhadap prosesnya (formatif). Hubungan antara Model CIPP dan Evaluasi Formatif-summatif dapat dilihat dalam gambar berikut :¹⁰³

Tabel 2.4. Hubungan Evaluasi Formatif, Summatif dan CIPP

EVALUATION ROLES	<i>Context</i>	<i>Input</i>	<i>Process</i>	<i>Product</i>
Formative Evaluation: Prospective application of CIPP information to assist decision making and quality assurance	Guidance for identifying needed interventions and choosing goals (based on assessing needs, problems, assets, and opportunities).	Guidance for choosing a program or other strategy (based on assessing alternative strategies and resource allocation plans) followed by examination of the work plan.	Guidance for implementing the work plan (based on monitoring and judging activities and periodic evaluative feedback).	Guidance for continuing, modifying, adopting, or terminating the effort (based on assessing outcomes and side effects).
Summative Evaluation: Retrospective use of CIPP information to sum up the program's merit, worth, probity, and significance	Comparison of goals and priorities to assessed needs, problems, assets, and opportunities.	Comparison of the program's strategy, design, and budget to those of critical competitors and to the targeted needs of beneficiaries.	Full description of the actual process and record of costs. Comparison of the designed and actual processes and costs.	Comparison of outcomes and side effects to targeted needs and, as feasible, to results of competitive programs. Interpretation of results against the effort's assessed context, inputs, and processes.

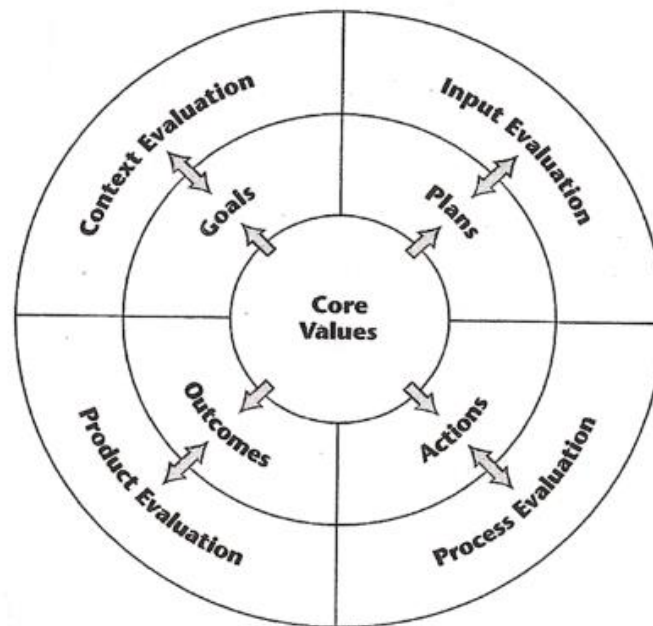
Model CIPP dapat digunakan dalam mengevaluasi proyek, program, personel, produk, institusi, dan sistem. Model ini dikonfigurasi untuk digunakan dalam evaluasi internal yang dilakukan oleh evaluator organisasi, evaluasi mandiri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individu, dan evaluasi eksternal yang dikontrak. Evaluasi CIPP terdiri dari empat komponen yang saling

¹⁰³ Ibid., h.6

terkait, hubungan antar 4 komponen digambarkan dalam gambar sebagai berikut

.¹⁰⁴

Gambar 2.3. Hubungan Komponen Evaluasi CIPP



Dalam gambar di atas, dapat dilihat bahwa evaluasi CIPP secara komprehensif meliputi seluruh proses program, masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁵

1. *Context Evaluation*

Evaluasi konteks menilai kebutuhan, tujuan, aset, dan masalah dalam program yang dijalankan. Umpan balik dari evaluasi ini digunakan untuk menetapkan (atau memperjelas) tujuan yang didasarkan pada penilaian

¹⁰⁴ Stufflebeam L., Daniel, *CIPP Evaluation Model Checklist: A Tool for Applying the CIPP Model to Assess Projects and Programs*, (USA: Western Michigan University, 2015), h.1

¹⁰⁵ Ibid, h.19-33

kebutuhan penerima manfaat yang ditargetkan dan kemudian menilai sejauh mana hasil program secara efektif menangani kebutuhan penerima manfaat yang dituju. Secara konteks program pemberdayaan ekonomi lokal menuntut partisipasi desa/masyarakat (*community engagment*) dalam proses mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, aset yang dibutuhkan dan masalah-masalah yang terjadi.

1. *Input Evaluation*

Evaluasi masukan menilai perencanaan strategi yang digunakan, rencana kerja dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program pemberdayaan ekonomi kepada penerima manfaat yang dinilai dan ditargetkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih, menyempurnakan, dan mendapatkan dana alternatif untuk program baru atau untuk meninjau dan merevisi rencana program yang sudah dijalankan sebelumnya.

2. *Process Evaluation*

Evaluasi proses memantau, mendokumentasikan, dan menilai program program. Hasil evaluasi berguna untuk memandu dan memperkuat kegiatan program dan untuk mendokumentasikan kegiatan program dan pengeluaran.

3. *Product Evaluation*

Product Evaluation terdiri dari 4 bagian yaitu :

- (a) *Impact Evaluation*, evaluasi yang menilai jangkauan program ke sasaran dan dampaknya terhadap masyarakat. Hasil evaluasi dampak digunakan untuk memastikan bahwa program tersebut menjangkau penerima manfaat yang dituju, mendokumentasikan dan membuat penilaian

terkait orang dan kelompok aktual yang dilayani, dan mendokumentasikan dampak program pada masyarakat sasaran.

(b) *Sustainability Evaluation*, evaluasi yang menilai sejauh mana suatu program akan atau berhasil dilembagakan dan dilanjutkan dari waktu ke waktu. Hasil evaluasi ini untuk membantu menentukan apakah suatu program harus dilanjutkan dan, jika jadi, untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan program jangka panjang yang efektif dan sukses.

(c) *Effectiveness Evaluation*, evaluasi yang mendokumentasikan dan menilai kualitas, efektivitas biaya, dan signifikansi hasil. Hasil evaluasi ini untuk mendokumentasikan berbagai hasil program (termasuk efek samping) dan untuk menilai hasil dalam pertimbangan kebutuhan penerima manfaat dan biaya program.

(d) *Transportability Evaluation*, evaluasi yang menilai sejauh mana Program telah (atau mungkin) berhasil diadaptasi dan diterapkan di tempat lain. Hasil evaluasi ini untuk membantu menyebarkan keberhasilan program dan, seringkali, memberikan dukungan untuk pendanaan program di masa mendatang.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Disertasi yang ditulis oleh Sungkowo Edy Mulyono dengan judul: “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk

Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin”¹⁰⁶, penelitian disertasi ini merupakan studi empiris di kota Semarang yang memiliki tujuan untuk: (1) menganalisis profil orang miskin yang menganggur, berusia produktif dan berpotensi di Kota Semarang; (2) menganalisis kebutuhan pasar untuk mewujudkan usaha mandiri; (3) memformulasikan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan usaha mandiri bagi; (4) merumuskan model pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan usaha mandiri; dan (5) mengestimasi biaya transaksi (transaction cost) yang diperlukan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi orang miskin yang menganggur, dan berpotensi. Hasil penelitian disertasi ini menawarkan strategi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan empat skenario: (1) memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, pelatihan dimulai dari awal sampai mampu melakukan usaha mandiri; (2) memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, yaitu memberikan motivasi dan penyuluhan; (3) memiliki kemauan dan kemampuan tetapi tidak mau berkembang karena merasa sudah cukup, penyadaran pandangan hidup melalui pendidikan keagamaan; dan (4) memiliki kemauan serta kemampuan tetapi tidak mau bekerja karena malas, melalui motivasi dan pemberian contoh-contoh. Sedangkan yang memiliki kemampuan dan kemauan, pelatihan usaha mandiri atau mencari alternatif ke wilayah lain. Strategi secara umum melalui penyadaran, transformasi, dan peningkatan intelektual.

¹⁰⁶ Sungkowo Edy Mulyono, *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin*, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Relevansi penelitian disertasi ini dengan penelitian Sungkono terletak pada model pemberdayaan melalui pendidikan non formal, pelatihan sebagai salahsatu bentuk pendidikan non formal juga digunakan sebagai model pemberdayaan ekonomi desa binaan UIN Raden Intan. Perbedaan utama adalah masyarakat sasaran pemberdayaan, pada penelitian Sungkono masyarakat sasaran pemberdayaan adalah masyarakat miskin perkotaan, sementara dalam penelitian disertasi ini masyarakat sasaran adalah masyarakat desa.

Disertasi yang ditulis oleh Nugroho Pratomo dengan judul “Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup”¹⁰⁷, Nugroho melakukan penelitian terhadap program Desa Mandiri Energi (DME), Program desa mandiri energi (DME) pada awalnya dilaksanakan sebagai sebuah program pemerintah untuk menghadapi gejolak harga minyak mentah dunia di tahun 2005, dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Berbagai sumber bahan bakar alternatif dikembangkan di berbagai daerah, termasuk salah satunya adalah minyak jarak. Program DME berbasis minyak jarak ini, berawal dari adanya kebutuhan dari PT RNI untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar bagi pabrik-pabrik gula yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, program ini terus berkembang di berbagai daerah. Salah satu daerah yang menjadi DME minyak jarak ini adalah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini kemudian dicanangkan sebagai DME berbasis jarak oleh Presiden SBY, yang sekaligus menjanjikan

¹⁰⁷ Nugroho Pratomo, *Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup*, Disertasi, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2015

bantuan kepada para kelompok tani untuk pengembangan tanaman jarak. Dana bantuan yang telah diberikan oleh PERTAMINA juga sudah disalurkan dan dibelikan mesin pengolah minyak jarak di Kecamatan Toro. Namun dalam perkembangannya, DME yang ada tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan akhirnya berhenti. Kegagalan inilah yang kemudian dicoba untuk diteliti dalam penelitian ini. Khususnya terkait dengan aspek sosial yang menyebabkan kegagalan DME tersebut. Hasil penelitian dalam disertasi ini mengusulkan model pemberdayaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dalam DME yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah dengan merubah pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan energi secara subsisten di desanya dan ketahanan energi nasional secara lebih luas, untuk itu konsep yang paling cocok adalah konsep *triple helix*.

Relevansi penelitian disertasi ini dengan penelitian Nugroho Pratomo terletak pada fokus kajiannya yaitu pemanfaatan potensi sumber daya lokal, sama seperti program pemberdayaan ekonomi desa binaan, meskipun jika dilihat dari jenis sumber daya lokalnya jauh berbeda. Pada penelitian Nugroho Pratomo peran pemerintah sangat menonjol dalam memberdayakan masyarakat melalui program DME, berbeda dengan program Desa Binaan, dimana peran pemerintah sangat minim, itupun hanya pemerintah tingkat desa.

Disertasi yang ditulis oleh Yusuf Gunawan dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru”¹⁰⁸, disertasi ini merupakan

¹⁰⁸ Yusuf Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru*, cetakan pertama, (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2017), Disertasi

pemaparan tentang sebuah desa di Indonesia yaitu Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak di Tengah Java, sebagai prototipe model pemberdayaan yang berhasil untuk pedesaan masyarakat yang secara efektif telah memobilisasi partisipasi masyarakat untuk mencapai pengembangan komunitasnya. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kunci sukses pengembangan masyarakat di Desa Tlogoweru merupakan sebuah pembangunan yang digerakkan oleh pemberdayaan masyarakatnya yang memungkinkan mereka menampilkan aktivitas partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan masyarakat mereka. Ada tiga hal mendasar yang dikaji dalam disertasi ini yaitu: Pertama, di konteks multiwilayah Republik Indonesia dimana mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, dengan kata lain pengembangan masyarakat pedesaan harus menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam program pengembangan masyarakat. Selanjutnya dari sudut pandangan ilmu politik, desa adalah unit pemerintahan terkecil, bahkan dapat didefinisikan sebagai miniatur Negara. Dengan kata lain, sebuah pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat pedesaan merupakan cara yang efektif untuk memahami bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat secara nasional. Kedua, kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat multi-spektrum, tidak hanya dalam hal semantik, tetapi juga dalam bentuk adat istiadat budaya atau struktur institusi sosial, hal ini mengarah pada Kondisi tiap desa sangat berbeda antara satu desa dalam wilayah dengan desa di wilayah lain. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma pemberdayaan masyarakat yang menjadi model bagi pemberdayaan komunitas pedesaan yang lebih menekankan pada partisipasi komunitas. Ketiga, sejak dibangunnya masyarakat pedesaan bisa menjadi indikator

pembangunan nasional, kemudian konsep Pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam memotivasi komunitas untuk berpartisipasi dalam mendukung pengembangan komunitas mereka sendiri.

Penerapan konsep desa membangun melalui partisipasi masyarakat dalam program desa binaan/mitra dalam penelitian Yusuf Gunawan adalah konsep yang relevan dengan usulan dalam penelitian disertasi ini, sementara perbedaannya terletak pada fokus pemberdayaan yang lebih menekankan pada pemberdayaan aspek sosial dan budaya masyarakat daripada aspek ekonomi seperti pada program desa binaan.

Disertasi yang ditulis Haryono dengan Judul “Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor”¹⁰⁹, disertasi ini mengangkat salahsatu program pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang dikenal dengan Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM) yang diklaim berhasil namun tidak sejalan dengan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, atas dasar kondisi ini maka yang menjadi rumusan masalah dalam disertasi ini adalah: Pertama, bagaimana efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam PPK di Kabupaten Bogor. Kedua, apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPK. Model evaluasi menggunakan model CIPP dan hasil temuannya adalah: Pertama, evaluasi program selama ini lebih pada aspek teknis dan ekonomis dan tidak bermuatan pemberdayaan. Kedua, penetapan jenis program sesuai konteks, input program belum mencukupi kebutuhan, Ketiga, faktor

¹⁰⁹ Haryono, *Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor*, Program Pasca Sarjana FISIP UI, 2010

penghambat pemberdayaan seperti penggunaan evaluasi non pemberdayaan, sosialisasi program terbatas, tidak adanya pendampingan khusus bagi keluarga miskin, dan tidak adanya jaminan keberlanjutan program. Keempat, untuk mencapai hasil pemberdayaan maksimal perlu penerapan konsep pemberdayaan sehingga transformasi sosial akan berlangsung terutama melalui pendidikan, pendampingan dan evaluasi. Evaluasi program model CIPP sesuai untuk melakukan evaluasi program pemberdayaan, jika pada keempat unsurnya bermuatan pemberdayaan dan dilakukan secara partisipatif (participatory empowerment evaluation). Kelima, keberlanjutan suatu program pemberdayaan akan tercapai jika aspek pengembangan kemandirian dilaksanakan sejak awal dan dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk berinisiatif membuat program sesuai kemampuan sendiri (otonom), dan bukan harus melaksanakan program yang dikembangkan oleh pemerintah (pusat).

Model studi evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam penelitian disertasi Haryono memiliki relevansi dengan model studi evaluasi yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product), sementara perbedaannya adalah program yang dievaluasi, Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salahsatu program pemerintah dalam penganggulangan kemiskinan, dan pemerintah terlibat penuh dalam program tersebut, berbeda dengan program desa binaan yang menjadi tanggungjawab perguruan tinggi.

Penelitian Matthieu Cognac dan Brian Wei, “*Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java*”¹¹⁰, Indonesia aims to receive 6.5 million tourists in 2009, including business visitors. Indonesia’s tourism sector garnered US \$7.8 billion in foreign exchange and spurred the demand for local products and services. The overwhelming majority of Indonesia’s tourism revenues are generated in province of Bali. As such, a relatively narrow geographic region garners the majority of the national tourism earnings. Indonesia launched a national campaign “Visit Indonesia 2008” following the paths of a similar initiative undertaken very successfully in Malaysia in 2007. However a lack of preparation and the initial impacts of the Crisis did not enable the campaign to reach the success it had envisaged. One year later, the program was extended with the “Visit Indonesia 2009” initiative.

Beyond the beaches of Bali and Lombok and passed the temples of Borobudur and nearby Yogyakarta in Central Java, tourism remains largely under exploited. East Java is no exception. Despite the dramatic volcano and National Park of Bromo Tengger Semeru, existence of nearby unspoiled beaches, infrastructure in and near Malang including a good communications network including roads, an airport and a railway system, and the existence of tour operators and business hotel in and near the city, both foreign and domestic tourism remains very limited. And yet, East Java and more specifically the districts closest to Bromo, such as Malang, offer tremendous untapped potential to become a world class tourism destination.

¹¹⁰ Matthieu Cognac dan Brian Wei, “*Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java*”, ILO Conference, Malang 1-3 Desember 2009

A series of three workshops were held at the start of the LED initiative in East Java. The first workshop was used to sensitizing the local community to the practical concept of local development, the rationale behind the activities, and a means for local stakeholders to begin to interaction with one another. The second workshop involved territory diagnosis of region's economic and employment opportunities. This required local stakeholders to think about their sub-district existing assets, strengths, opportunities, and challenges so as to identify priority challenges and strategize lines of intervention to address them. From the workshops in East Java, agribusiness and tourism were highlighted as major opportunities for regional growth and development. In the third workshop, local stakeholders work on developing an LED strategy for their area.

The Project has increased the number of workers engaged in formal economy tourism work, such as hotels, restaurants, tour operators, and transportation services. Moreover, informal economy business that provide a supporting role to the formal economy businesses and those who directly service tourists have also seen an increase in employment. Increasing jobs helps absorbs unemployed workers back into the workforce caused by the Global Economic Crisis and developing alterative sources of income for households largely dependent on agribusiness mitigates the effect of volatile commodities markets.

To enable the region to reach achieve its full economic potential, the policy coherence and interagency coordination among different local and regional actors (i.e. sub-district government and community organizations through to East Java Tourism Office and Surabaya Chambers of Commerce) will be needed to create

cohesive strategies for territorial competitiveness. Moreover, the LED initiative in Malang and Pasuruan is an integrated approach to rural development that combines infrastructure upgrading to better access to the Bromo area, capacity building to create new skills among the local population for the emerging hospitality sector, and business development services to prepare local enterprises for new opportunities and challenges that will arise. The tightly woven set of business supports provides local businesses and prospective entrepreneurs with a comprehensive and easily accessible set of services to afford them the highest probability of business success.

Penelitian Cognac dan Wei adalah bagian dari proyek ILO dalam mempromosikan *Local Economic Development* (LED), penelitian ini mencoba menggali potensi pariwisata sebagai sumber daya lokal khususnya di daerah Malang yang berada dalam jangkauan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemberdayaan ekonomi lokal dilaksanakan melalui serangkaian workshop. Workshop pertama untuk menyadarkan masyarakat tentang konsep praktis pembangunan ekonomi lokal, dan melalui workshop ini dijadikan sarana pertama bagi pemangku kepentingan membangun hubungan dengan masyarakat. Workshop kedua melakukan diagnosis terhadap potensi ekonomi dan peluang kerja dan berdasarkan diagnosis muncul potensi Agribisnis dan Pariwisata yang potensial dikembangkan. Workshop ketiga para pemangku kepentingan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi lokal. Hasil dari proyek ini telah berhasil meningkatkan pekerjaan dalam bidang formal pariwisata seperti hotel, operator tour dan jasa transportasi dan pekerjaan informal yang mendukung pelayanan wisatawan

serta berhasil memberi penghasilan tambahan disamping penghasilan utama di bidang agribisnis.

Penelitian Cognac dan Wei memiliki relevansi dengan penelitian Disertasi ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi lokal, sementara perbedaannya adalah pada potensi lokal yang dikembangkan, jika pada desa binaan yang ingin dikembangkan adalah potensi usaha pertanian dengan sasaran masyarakat desa, pada penelitian Cognac dan Wei potensi lokal utama yang dikembangkan adalah pariwisata dengan masyarakat sasaran pekerja migran yang kehilangan pekerjaannya akibat krisis ekonomi.

Penelitian Iqbal Tajuddin dkk., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”¹¹¹, Tujuan penelitian ini, 1) untuk mengetahui dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi lokal berwawasan lingkungan, 2) menganalisis dampak pembangunan ekonomi lokal dengan berwawasan lingkungan. Populasinya adalah para petani desa yang tergabung dalam kelompok tani yang berjumlah 252 orang. Pengambilan sampel sebanyak 20% atau 50 sampel menggunakan proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi secara simultan antara pemberdayaan masyarakat terhadap

¹¹¹ Iqbal Tajuddin, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Indonesian Journal of Conservation, Vol.7, No. 2, 2018

pembangunan ekonomi lokal berwawasan lingkungan yaitu sebesar 58,3%. Dampak pembangunan ekonomi lokal terhadap lingkungan bagi masyarakat, peningkatan pendapatan, perluasan lapangan kerja, pengurangan longsor dan peningkatan jumlah mata air. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif antara pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan ekonomi lokal melalui usaha berwawasan lingkungan di Desa Ngrancah.

Penelitian Iqbal dkk., fokus kajiannya adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan, hal ini sangat relevan dengan visi dan misi yang ingin dikembangkan pada bidang Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Intan, masyarakat sasaran dan potensi ekonomi yang dikembangkan juga memiliki kesamaan, sama-sama masyarakat desa dengan potensi utama hasil pertanian. Perbedaan dengan penelitian disertasi ini adalah metode penelitian yang digunakan, Iqbal dkk., menggunakan metode statistik analisis regresi berganda untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan ekonomi berwawasan lingkungan terhadap pendapatan masyarakat.

Penelitian Mardjoko Idris dan Indal Abror yang berjudul “Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi”¹¹², penelitian ini akan mengidentifikasi pelaksanaan Program Pembangunan (Village Development Program) di tiga wilayah, Kelurahan Tegal Pangung, Kricak Kricak, dan Prawirodirjan yang dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga. Desa Mitra yang dilaksanakan oleh UIN Sunan Kalijaga terdiri dari dua

¹¹² Mardjoko Idris dan Indal Abror, *Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi*, Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No. 3 September-Desember 2008

bidang pembinaan, yaitu: Bidang Keagamaan dan Bidang Ekonomi. Dalam bidang Keagamaan fokus pada Penyuluhan Agama dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Musholla dan Masjid. Dampak Desa Binaan UIN Sunan Kalijaga terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya perubahan kondisi fisik, sosial, budaya, agama, dan ekonomi ke arah yang lebih baik. Hasil penelitian di tiga wilayah ini menghasilkan adanya nilai positif bagi masyarakat, yakni adanya Perubahan pada kondisi fisik, sosialbudaya, agama dan ekonomi ke arah yang lebih baik. Hal tersebut selain semakin meningkatnya pemahaman keagamaan oleh masyarakat, serta semakin lengkapnya sarana prasarana di masyarakat, juga sangat ditentukan oleh keberhasilan Penyuluh Desa Binaan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan pemberdayaan Masyarakat merupakan aspek penting dari tujuan umum dari Desa Binaan, yaitu pengembangan masyarakat (Community development). Pemberdayaan masyarakat yang aktual lainnya adalah bagaimana masyarakat bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, masyarakat tidak tersingkirkan dalam percaturan bisnis ataupun pengaruh dari kemajuan teknologi di era globalisasi. Kenyataan telah membuktikan bahwa masyarakat belum mampu memikul semangat itu. Di sini peran Perguruan Tinggi, melalui Program Desa Binaan sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut.

Penelitian Mardjoko Idris dan Indal Abror memiliki relevansi pada karakteristik program, karakteristik dan model pemberdayaan desa binaan/mitra yang dilaksanakan oleh PTKIN secara umum memiliki kesamaan, sementara perbedaan utama dengan penelitian disertasi ini adalah pada tema pemberdayaan yang dikaji, pada program pemberdayaan masyarakat UIN Sunan Kalijaga tema

program lebih terfokus pada aspek keagamaan, sementara pemberdayaan masyarakat UIN Raden Intan pada aspek ekonomi.

Penelitian Yulianto Purnomo Prihatmaji dkk. yang berjudul “Evaluasi dan Pemetaan Potensi Desa Mitra DPPM UII”¹¹³, Desa Mitra (Desa Mitra) DPPM UII merupakan perwujudan catur dharma UII yang merupakan program bina lingkungan dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis tematik potensi lokal dan berkelanjutan. Program DesaMitra sudah dilakukan sejak lama, namun diukur dan direncanakan secara intensif mulai tahun 2006. Penelitian kolaboratif dengan komunitas, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian masyarakat adalah sebuah program dikembangkan dalam program Desa Mitra yang didukung dari dana internal UII, dana eksternal DIKTI dan / atau CSR dari berbagai perusahaan. Untuk mengukur pencapaian tujuan dan manfaat program DesaMitra diperlukan kajian evaluasi dan pemetaan. Evaluasi termasuk kesempurnaan program, pemahaman komunitas dan mereka kesadaran untuk mandiri. Evaluasi lusinan dengan purposive random sampling DesaMitra mengakuisisi 7 desa, yaitu: Sendangagung, Sendangsari, Wukirsari, Sindumartani, Cokrodiningratan yang terletak di Kabupaten Sleman dan Kotamadya Yogyakarta. Hasilnya diperoleh 5 desa untuk dikembangkan dalam waktu dekat yang dinilai memiliki potensi belum berkembang, motivasi tinggi dari masyarakat dan mendukung program terkait lainnya. Kedua desa yang tertunda untuk dikembangkan dinilai efektivitas bantuan pembangunannya program dan tingkat pengembangan diri orang-orangnya.

¹¹³ Yulianto Purnomo Prihatmaji dkk., *Evaluasi dan Pemetaan Potensi Desa Mitra DPPM UII*, Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 1, Januari 2015

Penelitian Prihatmaji dkk., memiliki relevansi dengan penelitian disertasi ini pada metode yang digunakan, sama-sama mengevaluasi program desa binaan/mitra meskipun model evaluasi yang digunakan berbeda, yang paling menarik dalam penelitian Prihatmaji dkk. adalah melakukan pemetaan potensi desa, pemetaan potensi desa inilah yang menjadi salahsatu tahap yang diusulkan dalam pemberdayaan ekonomi desa mitra.

Tabel 2.5. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Relevansi
1	Disertasi: Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin (Sungkowo Edy Mulyono, 2011)	Pemberdayaan ekonomi lokal yang akan dievaluasi menitikberatkan pada pendidikan non formal seperti tema pelatihan-pelatihan pada masyarakat desa binaan UIN Raden Intan
2	Disertasi: Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup (Nugroho Pratomo, 2015)	Basis pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang tersedia sebagai usulan pengembangan model pemberdayaan ekonomi lokal
3	Disertasi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru (Yusuf Gunawan, 2017)	Penerapan konsep desa membangun melalui partisipasi masyarakat dalam program desa binaan/mitra
4	Disertasi: Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor (Haryono, 2010)	Studi evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP pada program pemberdayaan masyarakat
5	Penelitian (Proyek ILO): <i>“Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java”</i> (Matthieu Cognac dan Bria Wei, 2009)	Fokus Kajian tentang pemberdayaan ekonomi lokal
6	Jurnal: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang (Iqbal Tajuddin dkk., 2018)	Pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berwawasan lingkungan sesuai dengan usulan program desa mitra
7	Jurnal: Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi	Karakteristik dan model pemberdayaan desa mitra yang dilaksanakan oleh PTKI secara umum memiliki kesamaan

3. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi dibutuhkan untuk dijadikan acuan / ukuran keberhasilan suatu program yang dievaluasi. Berhasil tidaknya suatu program atau efektifitas suatu program akan diketahui setelah dilakukan evaluasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan model evaluasi CIPP dan konsep pemberdayaan ekonomi lokal desa binaan, kriteria evaluasi dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kriteria Evaluasi

No	Aspek	Komponen yang dievaluasi	Kriteria Evaluasi
1	Context	Kebutuhan program, bagi institusi dan Masyarakat /Desa	Terlaksananya FGD dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan program bagi Institusi maupun Masyarakat/Desa dan untuk menentukan kesesuaian antara program pengabdian dengan visi dan misi universitas
		Masalah yang terjadi di tengah masyarakat/Desa	Terdapat Survey pendahuluan dengan menggunakan metode kuesioner maupun wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di tengah Masyarakat/Desa
		Tujuan program	Tersedianya Dokumen TOR, SK Tim, pedoman-pedoman dan peraturan pendukung lainnya
		Sumber daya lokal yang tersedia	Tersedianya Dokumen pemetaan potensi sumber daya lokal yang ada di setiap desa sasaran untuk menetapkan tema pemberdayaan yang paling tepat.
2	Input	Strategi yang digunakan	Tersedianyan dokumen perencanaan strategis program desa binaan
		Rencana kerja	Tersedianya dokumen rencana kerja
		Penganggaran	Tersedianya Anggaran yang berkelanjutan
3	Process	Proses pemantauan/monitoring	Terlaksananya monitoring yang terjadwal dan menghasilkan laporan hasil monitoring
		Pelaksanaan Program	Terlaksananya program sesuai dengan jadwal dan menghasilkan laporan hasil pelaksanaan

4	Product	Impact: Jangkauan Program dan Dampaknya terhadap masyarakat	Menjangkau masyarakat lemah pada desa sasaran dan memberi dampak positif secara ekonomi
		Sustainability: Keberlanjutan program	Penerimaan dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap program desa binaan
		Effectiveness : Efektifitas dan efisiensi serta signifikansi hasil	Program dijalankan secara efektif dan efisien serta memberikan hasil yang signifikan
		Transportability: Adaptasi Program	Program desa binaan dapat diterapkan ditempat lain dengan karakteristik permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anglin V., Roland. *Promoting Sustainable Local And Community Economic Development*. Boca Raton : CRC Press, 2011
- Ananda, Rusydi. Dan Rafida, Tien. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing, 2017
- Aziz, Shamsa, et.all. *Implementation of CIPP Model for Quality Evaluation at School Level: A Case Study*. Journal of Education and Educational Development, vol.5, No.1 (June 2018)
- Aliyuddin, Mukhlis. *Pengembangan Masyarakat Islam dalam Sistem Dakwah Islamiyah*. Journal Ilmu Dakwah Vo. 4 No. 14 Juli-Desember 2009
- Alkautsar, Zulfikar dan Hapsari, Meri Indri. *Implementasi, Pemahaman Konsumsi Islam Pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 1 No. 10 (Oktober 2014)
- Basarab, David J. *The Training Evaluation Process : a Practical Approach to Evaluating Corporate Training Programs (Evaluation In Educational and Human Service)*. New York: Springer, 1992
- Bernard Raho,SVD. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka 2007
- Bokhari A.H., Abla. *Universities Social Responsibility and Sustainable Development: Conceptual Framewor*, SSRG International Journal of Economics and Management Studies, vol.4, issue 12, December 2017
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Jakarta: BPS, 2019
- BPS Provinsi Lampung. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2019*. Bandar Lampung, 2019
- Bukit, Benjamin., dkk. *Pengembangan Sumberdaya Manusia : Teori, Dimensi Pengukuran, Dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta : Zahir Publishing, 2017
- Coleman S, James. *Dasar-Dasar Teori Sosial*. terj. Imam Mutaqien dkk, Bandung : Nusa Media, 2011
- Cula, Andi Suryadi. *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

- Cognac, Matthieu. Dan Wei, Brian. “*Local Economic Development in The Tourism Sector in East Java*, ILO Conference, Malang 1-3 Desember 2009
- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, *Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, edisi xii, Jakarta : Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018
- Djuwitaningsih, Ekapti Wahjuni. *Perubahan Perilaku Konsumtif dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna*. Jurnal Sosial Politik Humaniora, Vol. 7, No. 1, 2019
- Ezeala-Harrison, Fideli. *Economic Development : Theory and Policy Applications*, London : Praeger, 1996
- Fisher, Ron. *Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution*. The International Peace and Conflict Resolution School of International Service The American University, 2006
- Fox, Louise. And Romero, Carolina. *Concept and Measurement of Women’s Economic Empowerment*. World Bank Group : Social Protection and Labor Global Practice Group, 2017
- Gallardo, Roberto. *Community Economic Deveelopment : Key Concepts*. USA : Mississippi State University, 2015
- Garkovich, Lorraine E. *A Historical View of Community Development : Introduction to community development*. USA : Sage Publication Inc, 2011
- Gasser, Martin, et.all. *Pembangunan Ekonomi Lokal dalam Situasi Pasca Krisis : Panduan Operasional*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005
- Green, Gary Paul. *The Self-help Approach to Community Development : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*. ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green. California: Sage, 2011
- Gunawan, Yusuf. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tlogoweru*. cetakan pertama, Disertasi, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2017
- Haines, Anna. *Asset-Based Community Development : An Introduction to Community Development*. ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. New York: Routledge, 2009)
- Harney, Stefano and Olivia, Rita. *Civil Society and Civil Society Organizations in Indonesia*. Geneva: International Labour Office, 2003

- Haryanto, Dany dan Nugroho Edwi, G. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011
- Haryono. *Studi Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kasus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Bogor*. Disertasi Program Pasca Sarjana FISIP UI, 2010
- Herdiawanto, Heri., dkk. *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media Group, 2019
- https://www.ilo.org/empent/areas/WCMS_093862/lang--en/index.htm, diakses tanggal 2 Oktober 2020
- <https://www.pnpm-mandiri.org/PengertiandanTujuan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2020
- Hustedde, Ronald J. *Seven Theories For Seven Community Developers : An Introduction to Community Development*. ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. New York: Routledge, 2009.
- Idris, Mardjoko dan Abror, Indal. *Desa Mitra Kerja UIN Sunan Kalijaga Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Integrasi-Interkoneksi*. Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No. 3 September-Desember 2008
- Ismail, Asep Usman. *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu''afa*. Jakarta :Dakwah Press, 2008
- Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. Ke-VII, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kemendes DT. *Status IDM Provinsi Kabupaten Kecamatan 2019*. Jakarta: Kemendes DT, 2019
- Kurniawan, Boni., *Desa Mandiri Desa Membangun*. Buku 5, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015
- Laksmi. *Teori Interaksionisme Simbolik Dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Pustabiblia : Journal of Library and Information Science, Vol 1, Number 1, Desember 2017
- Lo Wing-Hung, Carlos., et.all. *University Social Responsibility : Conceptualization and An Assessment Framework*. New York: Springer, tt

- Lyon, Larry and Driskell, Robyn. *The Community in Urban Society*. second edition, Illinois : Wafeland Press, 2012
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif)*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020
- Majdi, Ahmad Labib. *K.H. Irfan Hielmy dan Interpretasi Khairu Ummah*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam, Voi.1 No.1, 2017
- Mayo, M. *Community Work*, dalam Hanvey and Philpot (eds), *Practising Social Work*, London: Routhledge, 1994
- Mertens, Donna M.and Wilson, Amy T. *Program Evaluation Theory and Practice*. second edition, New York: The Guilford Press, 2019
- Mulyono, Sungkowo Edy. *Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- Mursi, Abdul Hamid. *SDM yang Produktif : Pendekatan Alqur'an dan Sain*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Muzaqqi, F. *Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press, 2019
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Payne, M. *Social Work and Community Care*. London: McMillan, 1995
- Phillips, Rhonda and Pitmann H., Robert. *A Framework for Community and Economic Development : An Introduction to Community Development*. ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. New York: Routledge, 2009
- Pratomo, Nugroho. *Rekonstruksi Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan Hidup*, Disertasi, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, 2015
- Prihatmaji, Yulianto Purnomo dkk. *Evaluasi dan Pemetaan Potensi Desa Mitra DPPM UII*, Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 1, Januari 2015
- Qardhawi, Yusuf. *Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2018

Quran.kemenag.go.id

Qutb, Sayyid. *Masyarakat Islam*, Terj. Bandung: Al-Ma'arif, 1978

Raharjo Weda, Tri. *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Korporasi*. Surabaya : Jakad Publishing, 2018

Raharjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Cet. I, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1999

Rapanna, Patta. *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*. Cet. I, Makasar: CV. Sah Media, 2016

Razak, Zulkifli. *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodernisme)*. Makassar : Sah Media, 2017

Rhonda Phillips and Robert H. Pittman, *A Framework For Community and Economic Development : An Introduction to Community Development*. New York : Routledge, 2009

Ritzer, George and Goodman J., Douglas. *Teori Sosiologi Modern*, Alih bahasa Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2010

Robinson W., Jerry and Fear, Frank. *The Technical Assistance Approach : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*. ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green, California: Sage, 2011

Robinson W., Jerry and Smutko Steven, L. *The Role Of Conflict In Community Development : Introduction to Community Development (Theory, Practice, and Service-Learning)*. ed. by Jerry W. Robinson, Jr. and Gary Paul Green, California: Sage, 2011

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. cet ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2018

Rukin, *Pembangunan Perekonomian Masyarakat Mandiri*. cetakan pertama, Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2019

Rustiadi, Ernan dkk. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009

Sardo, Sulastri, dkk. *Implementasi Model Evaluasi Formatif Program Pembangunan Sosial: Partisipasi Multipihak Dalam Evaluasi Program*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016

- Siyoto, Sandu dan Sodik, M.Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. cetakan 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Slameto. *Model, Program, Evaluasi Beserta Tren Supervisi Pendidikan*. Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2020
- Smith, Michael J. *Program Evaluation in Human Services*. New York : Springer, 1990
- Stufflebeam, Daniel L. and Coryn, Chris L.S. *Evaluation Theory, Models, And Applications*. second edition, San Fransisco: Jossey-Bass, 2014
- Stufflebeam, Daniel L. and Zhang, Guili. *The CIPP Evaluation Model : How To Evaluate For Improvement and Accountability*. New York : The Guilford Press, 2017
- Stufflebeam, Daniel L. *CIPP Evaluation Model Checklist: A Tool for Applying the CIPP Model to Assess Projects and Programs*. USA: Western Michigan University, 2015
- Stufflebeam, Daniel L. *The CIPP Model For Evaluation : Evaluation in Education and Human Service*. Boston: Kluwer Academic Publisher, 2002
- Stufflebeam, Daniel L. *The CIPP Model For Evaluation*. Oregon: Annual Conference of the Oregon Program Evaluators Network (OPEN), 2003
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*. Cet Ke-1, Bandung: PT Ravika Adimatama 2005
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Sumohadiningrat, Gunawan. *Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata, 1997
- Sutoro, Eko. Dkk. *Desa Membangun Indonesia*. cetakan pertama, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Penerbit Al-Mawardi Prima, 2000
- Syarfi'i, Agus Ahmad. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001

- Tajuddin, Iqbal. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal Berwawasan Lingkungan Di Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, Indonesian Journal of Conservation, Vol.7, No. 2, 2018
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Vincent II, John W. *Community Development Practice : An Introduction to Community Development*. ed. by Rhonda Phillips and Robert Pittman H. New York: Routledge, 2009
- Wandersmen, Abraham., et.all. *The Principles of Empowerment Evaluation (Empowerment Evaluation Principles in Practice)*. edited by David M Fetterman and Abraham Wandersmen, New York : The Guilford Press, 2005
- Wani, Tahir Ahmad. *Buying Behaviour-An Islamic Perspective An Analysis Of An Ideal Muslim Buying Behaviour*, The Journal of Commerce, Vol. 5, No. 2, February, 2014
- Wrihatnolo, Randy R.dan Dwidjowijoto Nugroho, Riant. *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Pandauan Untuk pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007
- Yustika, Ahmad Erani. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

LAMPIRAN

Panduan Dokumentasi dan Observasi

Komponen yang dievaluasi	Dokumen dan Observasi	Keterangan	
		Ada	Tidak
Kebutuhan program, bagi institusi dan Masyarakat /Desa	Rencana Stragis LPPM		
	Rencana Induk Pengembangan LPPM		
Masalah yang terjadi di tengah masyarakat/Desa	Laporan Hasil Survey Pendahuluan		
Tujuan program	TOR kegiatan		
Sumber daya lokal yang tersedia	Laporan Hasil Pemetaan Potensi Desa		
Strategi yang digunakan	Pedoman Pelaksanaan PkM		
	Pedoman Pelaksanaan Desa Binaan		
	Standar Pelayanan Minimal		
Rencana kerja	SK Rektor Tentang Desa Binaan		
	Materi Desa Binaan		
Penganggaran	Dokumen RBA Desa Binaan		
Proses pemantauan/monitoring	Laporan Hasil Monitoring		
Program	Laporan Hasil Pelaksanaan Program Desa Binaan		
Produk	Laporan Hasil Evaluasi Program		
	Profil Desa		
	Profil Usaha Masyarakat		
	Foto/Video Kegiatan Desa Binaan		
	Foto/Video Kegiatan Ekonomi Masyarakat		

Panduan wawancara dengan informan

Kriteria Evaluasi	Instrumen	Panduan Wawancara
<p>Terlaksananya FGD dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebutuhan program bagi Institusi maupun Masyarakat/Desa dan untuk menentukan kesesuaian antara program pengabdian dengan visi dan misi universitas</p>	<p>Wawancara dengan Wakil Rektor I, LP2M, Kapus PkM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan saudara terhadap program Desa Binaan? 2. Bagaimana Proses perencanaan program Desa Binaan? 3. Bagaimana seharusnya program Desa Binaan yang paling ideal berdasarkan prinsip kemitraan universitas dan masyarakat? 4. Sejauh mana keterlibatan masyarakat sasaran dalam perencanaan program? 5. Bagaimana Strategi umum Program Desa Binaan dalam jangka panjang? 6. Bagaimana hubungan program Desa Binaan dalam usaha pencapaian Visi dan Misi UIN Raden Intan? 7. Apakah ada keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan program Desa Binaan? Jika ada sejauhmana keterlibatan tersebut? 8. Apa saja manfaat yang diterima UIN Raden Intan dari Program Desa Binaan berdasarkan prinsip <i>social responsibility</i>? 9. Apakah sudah dilakukan pemetaan potensi desa?
<p>Tersedianya dokumen perencanaan strategis program desa binaan</p>	<p>Wawancara dengan LP2M</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana strategi yang digunakan dalam program desa binaan? 2. Apakah sudah disusun Renstra LP2M? 3. Apakah program Desa Binaan layak menjadi program unggulan UIN Raden Intan?
<p>Tersedianya Anggaran yang berkelanjutan</p>	<p>Wawancara dengan LP2M dan bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Raden Intan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses perencanaan penganggaran program Desa Binaan? 2. Bagaimana ketersediaan sumber daya finansial bagi program Desa Binaan? 3. Apakah program Desa Binaan masuk dalam anggaran prioritas ? mohon kemukakan alasannya.
<p>Terlaksananya monitoring yang terjadwal dan teridentifikasinya kendala-kendala yang ada</p>	<p>Wawancara dengan tim Desa Binaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pelaksanaan program Desa Binaan? 2. Bagaimana proses monitoring program Desa Binaan? 3. Bagaimana dukungan masyarakat dalam program desa binaan? 4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di lapangan? Dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut?

		5. Menurut saudara, Apakah program Desa Binaan telah berhasil meberdayakan masyarakat? Jika berhasil, apa saja indikatornya?
Menjangkau masyarakat lemah pada desa sasaran dan memberi dampak positif secara ekonomi	Wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kondisi masyarakat secara umum di tempat saudara? 2. Apakah potensi desa yang dimiliki di tempat saudara? 3. Bagaimana menurut saudara untuk memaksimalkan potensi tersebut? 4. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di tempat saudara? 5. Bagaimana pandangan saudara terhadap program Desa Binaan UIN Raden Intan? Program pemberdayaan apa saja yang sudah dilaksanakan? 6. Apakah program telah tepat sasaran menjangkau masyarakat kurang berdaya? 7. Apakah program telah memberi dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat?
Penerimaan dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap program desa binaan	Wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana harapan saudara terhadap program Desa Binaan UIN Raden Intan? 2. Apakah program Desa Binaan UIN Raden Intan penting untuk dilanjutkan? Kemukakan alasannya.
Program dijalankan secara efektif dan efisien serta memberikan hasil yang signifikan	Wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan harapan saudara? 2. Apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati?
Program desa binaan dapat diterapkan ditempat lain dengan karakteristik permasalahan yang sama.	Wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tema program Desa Binaan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? 2. Apakah tema tersebut dapat dilaksanakan pada kelompok masyarakat yang lain?

Dokumentasi Pengumpulan Data Penelitian





